



**STRATEGI PERTAHANAN MARITIM REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK DI LAUT CINA TIMUR**

*(PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA MARITIME DEFENSE STRATEGY IN
EAST CHINA SEA)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

SEPTY HANDAYANI

120910101011

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**STRATEGI PERTAHANAN MARITIM REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK DI LAUT CINA TIMUR**

*(PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SEA DEFENSE STRATEGY IN EAST
CHINA SEA)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

SEPTY HANDAYANI

120910101011

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Dwi Ariyanti dan Almarhum Aba Abdul Hamid yang selalu mendoakan serta memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang demi kelancaran hidup penulis;
2. Almarhum Ayah Yunus Hamzah;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Diri saya sendiri yang akhirnya dapat menyelesaikan skripsi;

MOTTO

It's not whether you get knocked down, it's whether you get up¹



¹ Quote of Vinve Lombardi (French poet, novelist and dramatist). Dikutip dari https://www.brainyquote.com/authors/vince_lombardi

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septy Handayani

NIM : 120910101011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Strategi Pertahanan Maritim Tiongkok di Laut Cina Timur”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya hasil plagiarisme. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018

Yang menyatakan,

Septy Handayani

120910101011

SKRIPSI

**STRATEGI PERTAHANAN MARITIM REPUBLIK RAKYAT
TIONGKOK DI LAUT CINA TIMUR**

Oleh

SEPTY HANDAYANI

120910101011

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agung Purwanto, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Muhammad Iqbal S.Sos., M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Strategi Pertahanan Maritim Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina timur” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Desember 2018
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Bersama Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D.
NIP. 196402081989021001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Agung Purwanto, M.Si.
NIP. 196810221993031002

Drs. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si
NIP. 197212041999031004

Anggota I

Anggota II

Agus Trihartono, S.Sos, MA., Ph.D.
NIP. 196908151995121001

Fuad Albayumi, S.IP, MA
NIP 197404242005011002

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Strategi Pertahanan Maritim Tiongkok di Laut Cina Timur; Septy Handayani; 120910101011; 83 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laut Cina Timur merupakan salah satu wilayah perairan yang berada di kawasan Asia Timur. Laut Cina Timur memiliki keunggulan berupa sumber daya alam dan bagian dari Jalur Komunikasi Laut (*Sea Lines Of Communication, SLOC*). Pada tahun 2012, Jepang membuat kebijakan dengan membeli tiga pulau dari lima pulau Diaoyu/Senkaku di laut Cina Timur. Kebijakan Jepang tersebut, berdampak pada peningkatan ancaman kedaulatan maritim Tiongkok di laut Cina Timur. Pasca kebijakan Jepang membeli pulau di laut Cina Timur, Amerika Serikat membentuk kebijakan di kawasan Asia Pasifik yang disebut dengan *Pivot Asia*. Bagaimana strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur, menjadi permasalahan utama.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, media cetak maupun media *online*. Data-data tersebut dianalisis lalu kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh tentang permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian dari skripsi ini bahwa strategi pertahanan maritim di laut Cina Timur adalah pertama menetapkan zona identifikasi pertahanan udara. Kedua adalah dengan aktivitas patroli militer Angkatan Laut Tiongkok (*People's Liberation Army Navy, PLAN*). Ketiga adalah dengan latihan militer bersama dengan angkatan bersenjata Rusia di laut Cina Timur. Keempat adalah Tiongkok membentuk strategi Anti akses dan Penolakan Wilayah (*Anti Access Anti Denial, A2/AD*) di laut Cina Timur. Tujuan dari strategi A2/AD adalah untuk mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pertahanan Maritim Tiongkok di Laut Cina Timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Moh. Hasan, M. Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak Sartam dan Bapak Panuluh, selaku operator jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Semoga tetap sehat dan selalu diberi kesabaran saat bertugas.
7. Teman-teman saya Fiqih, Moniq, Dhea, Radita, Taufiq dan warga GH. Terimakasih atas doa, semangat, dukungan dan segala bentuk bantuan yang kalian berikan selama proses penulisan skripsi.
8. Teman-teman di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember angkatan 2012 yang telah menjadi teman untuk berbagi dan diskusi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.

Jember, 19 November 2018

Penulis



DAFTAR GAMBAR

1.1 Skema Zona Maritim Negara	1
2.1 Peta Laut Cina Timur	19
2.2 Grafik Aktivitas Pesawat tempur Tiongkok di Laut Cina Timur.....	25
3.1 Peta Pangkalan Militer Amerika Serikat di Jepang	38
3.2 Peta Pangkalan Militer Amerika Serikat di Korea Selatan	41
3.3 Grafik Penjualan Senjata Amerika Serikat-Taiwan 1990-2017.....	45
4.1 Peta Zona Identifikasi Pertahanan Udara Tiongkok di Laut Cina Timur	51
4.2 Grafik Aktivitas Patroli Amngkalan Laut Tiongkok di Laut Cina Timur	56
4.3 Grafik Peningkatan Anggaran Belanja Militer Tiongkok 2013-2017.....	59
4.4 Perbandingan Kapabilitas militer Maritim Tiongkok dengan Jepang	65
4.5 Perbandingan Kapabilitas Militer Udara Tiongkok dengan Jepang	66
4.6 Perbandingan Kapabilitas Maritim Tiongkok-Korea Selatan	67
4.7 Perbandingan Kapabilitas Udara Tiongkok-Korea Selatan	68
4.8 Perbandingan Kapabilitas Maritim Tiongkok-Taiwan	69
4.9 Perbandingan Kapabilitas Udara Tiongkok-Taiwan.....	69

DAFTAR TABEL

4.1 Kapabilitas militer *7th Fleet* di Yokosuka 71



DAFTAR SINGKATAN



A2/AD	: <i>Anti Access anti Denial</i>
ADIZ	: <i>Air Defense Identification Zone</i>
AIT	: <i>American Institute in Taiwan</i>
CCG	: <i>China Coast Guard</i>
EIA	: <i>Energy Information Administration</i>
JMSDF	: <i>Japan Maritime Self Defense Force</i>
PLA	: <i>People's Liberation Army</i>
PLAAF	: <i>People's Liberation Army Air Force</i>
PLAN	: <i>People's Liberation Navy</i>
SEF	: <i>Strait Exchange Foundation</i>
SLOC	: <i>Sea Lines of Communication</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention Law Of Sea</i>
USFK	: <i>United States Force Korea</i>

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PEMBIMBINGAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	7
1.2.1 Batasan Materi	7
1.2.2 Batasan Waktu	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Landasan Teori.....	8
1.5.1. Teori Pencegahan (<i>Deterrence Theory</i>)	8
1.5.2. Teori Perimbangan Kekuatan (<i>Balance of Power Theory</i>).....	10
1.6 Argumen Utama	13
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Jenis Penelitian	14
1.7.2 Sifat Penelitian	14
1.7.3 Objek Penelitian	14
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.5 Teknik Analisis Data	15

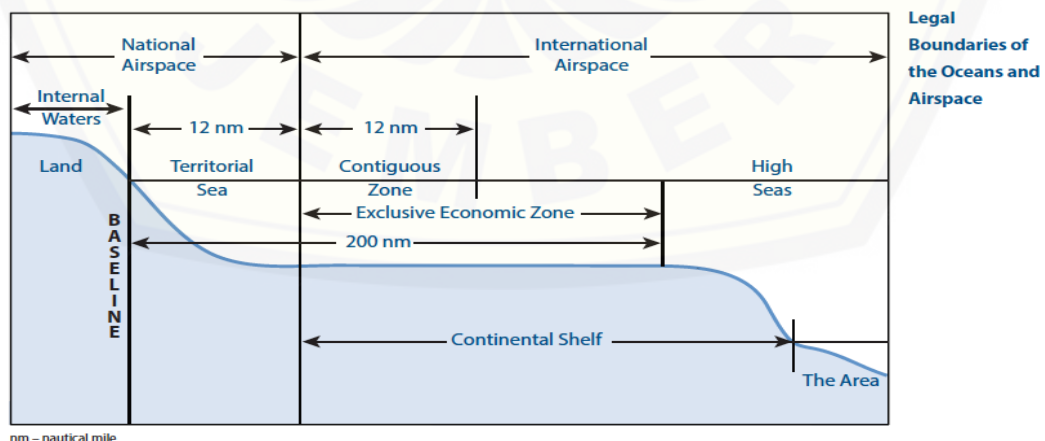
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB 2. ANCAMAN TERHADAP TIONGKOK DI LAUT CINA TIMUR ..17	
2.1. Profil Laut Cina Timur.....	17
2.2. Kebijakan <i>Pivot Asia</i> Amerika Serikat	20
2.3. Dinamika Konstelasi Politik di Asia Timur.....	23
2.3.1 Tiongkok dengan Jepang	23
2.3.2 Tiongkok dengan Korea Selatan	26
2.3.3 Tiongkok dengan Taiwan	28
BAB 3 RESPON TIONGKOK TERHADAP ANCAMAN DI LAUT CINA TIMUR	31
3.1. Strategi Pertahanan Maritim Tiongkok	31
3.2. Kepentingan Amerika Serikat di Asia	33
3.3 Aliansi Amerika Serikat di Asia Timur	36
3.3.1. Aliansi Amerika Serikat dengan Jepang	36
3.3.2. Aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan	40
3.3.3. Amerika Serikat dengan Taiwan	42
BAB 4 STRATEGI PERTAHANAN MARITIM TIONGKOK DI LAUT CINA TIMUR	47
4.1. Konsep Pertahanan dan Doktrin militer Tiongkok	47
4.2. Strategi Pertahanan Maritim di Laut Cina Timur	49
4.2.1. Menetapkan Strategi Zona Identifikasi Pertahanan Udara	50
4.2.2. Peningkatan Aktivitas Angkatan Laut Tiongkok di laut Cina Timur	54
4.2.3. Latihan Militer Tiongkok dan Rusia di Laut Cina Timur	57
4.2.4. Strategi Anti Akses dan Penolakan Wilayah (<i>Anti Access Anti Denial</i>)....	58
4.3 Perimbangan Kekuatan Maritim Negara Asia Timur	64
4.3.1 Tiongkok dengan Jepang	64
4.3.2 Tiongkok dengan Korea Selatan	67
4.3.3 Tiongkok dengan Taiwan	68
4.3.4 Tiongkok dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan,Taiwan	70
BAB 5 KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu politik-keamanan internasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan geopolitik negara. Geopolitik merupakan upaya negara menggunakan keunggulan geografis yang dimiliki untuk mencapai tujuan nasional (Germond, 2015). Negara memiliki zona yang diunggulkan dalam pencapaian kepentingan nasional, salah satunya adalah zona maritim. Maritim memiliki daya tarik serta potensi besar seperti sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh negara untuk menjamin keberlangsungan hidup. Hal tersebut yang kemudian menjadikan maritim sebagai fokus wilayah pencapaian kepentingan nasional.

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations Convention Law Of Sea*, UNCLOS) mendefinisikan maritim sebagai wilayah atau zona perairan meliputi perairan internal, laut teritorial, zona dekat, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen dan laut lepas (United Nations, 1982). Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations Convention Law Of Sea*, UNCLOS) merupakan hukum internasional yang mengatur tentang klaim dan batas laut negara. dalam artikel 2 UNCLOS menjelaskan bahwa masing-masing negara memiliki kedaulatan maritim yang terdiri dari permukaan laut, dasar laut dan kedaulatan udara di atas permukaan laut maksimum 12 mil laut yang diukur dari garis batas pantai.



Gambar 1.1 Skema Zona Maritim Negara

Diakses dari <https://www.maritime-executive.com/article/Law-of-the-Sea-Mechanisms-Examining-UNCLOS-Maritime-Zones-2014-12-01> pada 2 Februari 2019

Kemudian pada artikel 57, UNCLOS menetapkan batas sejauh 200 mil laut yang dihitung dari garis pantai sebagai jangkauan maksimum negara dalam melaksanakan aktivitas di laut (United Nations, 1982). Selain itu, UNCLOS juga memberikan hak kepada negara untuk dapat melakukan aktivitas eksplorasi, eksploitasi dan melestarikan sumber daya alam yang terkandung di laut. Hak eksklusif tersebut dijelaskan di dalam artikel 56 yang menyebutkan bahwa:

- (56) *“In the exclusive economic zone, the coastal State has:*
- (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;*
 - (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:*
 - (i) The establishment and use of artificial islands, installations and structures;*
 - (ii) Marine scientific research;*
 - (iii) The protection and preservation of the marine environment;*
 - (c) other rights and duties provided for in this Convention* (United Nations, 1982).

Asia Timur merupakan kawasan Asia paling timur. Kawasan Asia Timur secara geografis memiliki wilayah dengan kondisi perairan lebih luas dibandingkan dengan daratan. Total luas wilayah Asia Timur yang mencapai 11,8 juta km dengan 6 juta km merupakan wilayah perairan (Liu, 2013). Wilayah maritim Asia Timur memiliki potensi besar yakni kekayaan sumber daya alam yang terkandung seperti gas alam, minyak bumi dan jumlah ikan yang melimpah. Selain itu, wilayah maritim Asia Timur memiliki posisi strategis yakni sebagai bagian dari jalur komunikasi laut (*Sea Lines of Communication*, SLOC). Jalur komunikasi laut merupakan jalur yang digunakan oleh kapal untuk mendistribusikan barang hasil produksi (Pearson, 2014:44). Potensi sumber daya dan posisi wilayah yang strategis tersebut, menjadi daya tarik utama bagi negara di kawasan Asia Timur untuk berperan aktif di laut.

Salah satu wilayah maritim yang menjadi fokus wilayah pencapaian kepentingan nasional negara di kawasan Asia Timur adalah laut Cina Timur. Laut

Cina Timur merupakan bagian dari laut Cina yang mengalir ke arah timur laut meluas ke rantai Kepulauan Ryukyu Jepang, Kepulauan Jeju Korea Selatan, melewati Tiongkok hingga ke selat Taiwan (LaFond,2018). Laut Cina Timur adalah salah satu wilayah penting bagi negara di Asia Timur. Laut Cina Timur menjadi bagian dari jalur komunikasi laut (SLOC) yang menghubungkan kapal barang ke Samudra Pasifik. Selain itu, laut Cina Timur memiliki sumber daya seperti gas alam, minyak bumi dan ikan yang penting bagi aktivitas perekonomian negara (Valencia, 2007).

Peningkatan aktivitas negara untuk mencapai kepentingan nasional di laut Cina Timur, menjadi faktor penyebab munculnya dinamika di kawasan Asia Timur. Tiongkok dan Jepang merupakan dua aktor utama yang memiliki sejarah konflik panjang di laut Cina Timur. Konflik Tiongkok dan Jepang yakni berkaitan dengan klaim terhadap sejumlah pulau tak berpenghuni yang disebut Senkaku/Diaoyu (Brazil, Dickey, Kania, Allen, & Chen, 2016).

Pada 11 September 2012, Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda membeli tiga dari lima pulau dilaut Cina Timur (Emmers, 2013). Pasca dilakukan nasionalisasi terhadap tiga pulau tersebut, angkatan laut Jepang (*Japan Maritime Self Defense Force*, JMSDF) melakukan aktivitas patroli (Smith, 2013). Kebijakan nasionalisasi pulau di laut Cina Timur oleh Jepang tersebut, memunculkan respon kuat Tiongkok. Pasalnya, kebijakan dianggap tidak sah oleh Tiongkok. Selain itu, aktivitas penjagaan yang dilakukan oleh angkatan laut Jepang di Laut Cina Timur menimbulkan ancaman keamanan di laut Cina Timur (Pearson, 2014:34).

Ketegangan yang terjadi di laut Cina Timur antara Jepang dan Tiongkok, menarik perhatian Amerika Serikat untuk terlibat. Amerika Serikat merupakan negara aliansi kuat Jepang, sesuai dengan perjanjian kerjasama keamanan di tahun 1960 (Ministry of Foreign Affairs of Japan,2018). Militer Amerika Serikat berkomitmen untuk menjamin keamanan wilayah kedaulatan Jepang dari segala ancaman.

Pentingnya kawasan Asia khususnya Asia Timur bagi Amerika Serikat, tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sejak

berakhirnya Perang Dunia II, militer Amerika Serikat aktif beroperasi di kawasan Asia. Ketertarikan pada sumber daya alam dan wilayahnya yang strategis, menjadi alasan kuat eksistensi Washington di Asia. Selain faktor sumber daya, kehadiran militer Amerika Serikat di Asia Timur, memiliki urgensi tersendiri. Militer Amerika Serikat memiliki misi untuk mencegah penyebaran komunisme di kawasan Asia. Namun, hal tersebut gagal dengan kemerdekaan Tiongkok dan Korea Utara di bawah ideologi sosialis komunis (Wilde, 2018).

Untuk mewujudkan stabilitas kawasan dan memberikan jaminan keamanan bagi negara aliansinya, Amerika Serikat membentuk kebijakan yang disebut dengan "*Pivot Asia*". *Pivot Asia* merupakan seperangkat kebijakan pertahanan yang dibentuk khusus oleh Washington di kawasan Asia (Meijer, 2015). Salah satu langkah kongkrit dari kebijakan *Pivot Asia* Amerika Serikat adalah memindahkan angkatan laut dan angkatan udara. Sebelumnya, fokus pencapaian kepentingan nasional Amerika Serikat dilakukan di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Tetapi sejak dibentuknya kebijakan *Pivot Asia*, 60 persen dari angkatan laut dan angkatan udara Amerika Serikat di pindahkan ke Asia Timur (Pollack, 2016). Angkatan laut dan angkatan udara ditugaskan di pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Okinawa Jepang dan Yongson Korea Selatan (Etzioni, 2014)

Salah satu implementasi dari kebijakan *Pivot Asia* adalah latihan militer bersama. Angkatan laut Jepang (*Japan Maritime Self Defense Force*, JMSDF) bersama dengan pasukan armada ketujuh atau *7th Fleet* melaksanakan latihan militer di perairan dekat laut Cina Timur (Reuters, 2014). Latihan militer difokuskan untuk meningkatkan jaminan keamanan dan menjaga stabilitas kawasan di laut Cina Timur. Dalam latihan militer tersebut, Amerika Serikat menggunakan kapal induk USS Ronald Reagan sebagai kekuatan utama. Kehadiran kapal induk USS Ronald Reagan menunjukkan ketegasan posisi militer Jepang dan Amerika Serikat di Laut Cina Timur (Mie, 2013).

Laut Cina Timur merupakan bagian dari wilayah kedaulatan maritim Tiongkok yang sah. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS, Laut Cina Timur merupakan bagian dari kedaulatan maritim Tiongkok yang dihitung dari garis

dasar hingga jarak 12 mil laut. Sehingga Tiongkok memiliki hak maritim atas laut Cina Timur. Hak asasi maritim yang disebut oleh Tiongkok sebagai hak dan kepentingan maritim adalah hak negara untuk mengatur dan melakukan eksploitasi wilayah laut. Negara memiliki hak di wilayah laut yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS (Kardon, 2015). di Laut Cina Timur, Tiongkok memiliki hak atas kepulauan yang disebut dengan Diaoyu. Kepulauan Diaoyu merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok berdasarkan pada pasal 3 Hukum Laut Teritorial dan Zona Perbatasan tahun 1992 yang menyebutkan bahwa :

“The PRC's territorial land includes the mainland and its offshore islands, Taiwan and the various affiliated islands including Diaoyu Island, Penghu Islands, Dongsha Islands, Xisha Islands, Nansha (Spratly) Islands and other islands that belong to the People's Republic of China” (Standing Committee of the National People's Congress, 1992).

Peningkatan aktivitas Jepang dan Amerika Serikat, dipersepsikan sebagai ancaman kuat terhadap keamanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur. Pasalnya, Aktivitas latihan militer bersama Jepang dan Amerika Serikat sebagai implementasi dari kebijakan *Pivot Asia*, secara khusus ditujukan untuk Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang tidak memiliki hubungan aliansi dengan Amerika Serikat, dan memiliki persoalan sengketa dengan Jepang di laut Cina Timur (Schiavenza, 2013). Tiongkok mempersepsikan bahwa peningkatan aktivitas militer Jepang dan Amerika Serikat, bagian dari upaya membatasi ruang gerak militer Tiongkok di laut Cina Timur (Duchâtel, 2016)

Untuk menghadapi ancaman keamanan di laut Cina Timur, Tiongkok membentuk strategi pertahanan maritim. Strategi pertahanan maritim Tiongkok merupakan serangkaian kebijakan atau peraturan yang dilakukan oleh negara dengan menggunakan kekuatan maritim untuk mencapai kepentingan nasional (Martinson, 2016). Menurut Tiongkok, membentuk strategi pertahanan maritim di laut Cina Timur merupakan wujud rasionalitas negara untuk menjamin keamanan kedaulatan (Chapman, 2017).

Strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur antara lain yakni meningkatkan aktivitas militer Angkatan Laut Tiongkok atau *People Liberation*

Army (PLAN) di laut Cina Timur bersama dengan Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok (*China Coast Guard, CCG*) (Chapman, 2017). Peningkatan aktivitas merujuk kepada aktivitas patroli di Laut Cina Timur dengan menggunakan kapal Induk Liaoning. Kapal Induk Liaoning merupakan kapal induk pertama yang dimiliki oleh Angkatan laut Tiongkok yang resmi beroperasi di tahun 2012 (China Power, 2016). Bagi Tiongkok, Kapal induk merupakan cerminan kekuatan maritim negara yang kuat. Sehingga dalam upaya menjamin keamanan maritim, kapal induk menjadi aspek utama.

Untuk semakin meningkatkan kekuatan angkatan laut, Tiongkok juga menyelenggarakan latihan militer bersama dengan angkatan laut Rusia di laut Cina Timur pada tahun 2014 (ChinaDaily, 2014). Latihan militer Tiongkok bersama Rusia memiliki misi untuk persiapan menghadapi ancaman keamanan maritim. Selain itu, latihan militer bersama ditujukan untuk meningkatkan hubungan baik Tiongkok dan Rusia (Weitz, 2014).

Untuk semakin meningkatkan pertahanan maritim, Tiongkok juga menetapkan strategi anti akses dan penolakan wilayah (*Anti Access/Anti Denial, A2/AD*) di laut Cina Timur. Anti akses dan penolakan wilayah merupakan strategi pertahanan yang dilakukan untuk mencegah musuh untuk mendapatkan kendali di laut (Hempel, 2016). Strategi anti akses dan penolakan wilayah menekankan pada pentingnya penggunaan dan penempatan kapabilitas militer di sekitar pantai dalam melakukan pertahanan dan serangan apabila diperlukan.

Upaya Tiongkok menghadapi ancaman di laut Cina Timur dengan Strategi pertahanan Tiongkok, menjadi fenomena hubungan internasional yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Strategi pertahanan maritim yang difokuskan untuk melindungi hak dan kepentingan maritim Tiongkok di laut Cina Timur. Selain itu, strategi pertahanan maritim merupakan upaya pencegahan yang dilakukan Tiongkok agar tidak terjadinya konflik terbuka dengan militer Amerika Serikat dan aliansinya di laut Cina Timur.

Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, maka penulis menuangkannya dalam penelitian skripsi yang berjudul :

“Strategi Pertahanan Maritim Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Timur”.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Suatu penelitian ilmiah, ruang lingkup pembahasan memiliki kedudukan yang sangat penting karena mengarahkan tulisan tersebut agar lebih fokus pada kajian yang akan dianalisis. Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini terbagi kedalam dua bagian, yakni bagian batasan materi dan bagian batasan waktu. Batasan materi digunakan untuk memudahkan penelitian dan pembaca melihat garis besar dalam skripsi, sedangkan pada batasan waktu hanya menyangkut penyajian spesifik mengenai waktu tertentu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi bertujuan untuk menunjukkan ruang pembahasan suatu peristiwa atau objek yang akan dianalisis, yakni cakupan kawasan atau studi. Dalam skripsi ini, batasan materi akan berfokus pada strategi pertahanan maritim yang ditetapkan oleh Tiongkok di laut Cina Timur. Strategi pertahanan maritim Tiongkok dianalisa dari ancaman yang dihadapi oleh Tiongkok di laut Cina Timur.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam suatu penelitian adalah rentang waktu terjadinya suatu fenomena yang akan dianalisis. Dalam skripsi ini ditetapkan batas waktu mulai tahun 2012 hingga 2017. Tahun 2012 merupakan awal dari strategi pertahanan maritim melalui aktivitas patroli angkatan laut dan pasukan penjaga pantai Tiongkok menggunakan kapal induk pertama miliknya yakni Liaoning. Tahun 2017 menjadi akhir dari penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari suatu penelitian ilmiah. Dengan membuat rumusan masalah maka objek serta arah penelitian akan lebih jelas. Berkaitan dengan fenomena yang akan dianalisa, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana strategi pertahanan maritim Republik Rakyat Tiongkok di laut Cina Timur?”

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka tujuan penulisan penelitian adalah untuk mengidentifikasi strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur.

1.5 Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah perlu ditetapkan kerangka konsep yang berguna untuk membantu peneliti dalam menganalisa permasalahan. Kerangka dasar pemikiran dapat berupa konsep-konsep atau teori yang tersusun secara sistematis untuk membantu proses penulisan dan analisa terhadap masalah penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*) dan Teori Perimbangan Kekuatan (*Balance of Power Theory*).

1.5.1. Teori pencegahan (*Deterrence Theory*)

Perkembangan politik internasional memberikan peranan besar bagi negara dalam merumuskan kepentingan nasional. Masing-masing negara memiliki kepentingan nasional yang perlu untuk dicapai. Negara akan melakukan segala upaya untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Negara cenderung egois dengan hanya berfokus pada pencapaian tujuan nasionalnya. Kondisi tersebut yang kemudian yang menyebabkan munculnya ancaman. Untuk menghadapi ancaman diperlukan adanya upaya pencegahan.

Menurut Patrick M Morgan (Morgan, 2003:44) teori pencegahan merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai tindakan satu aktor yang melakukan ancaman kepada aktor lain untuk tidak melakukan serangan. Aktor dalam konteks ini adalah negara akan melakukan serangan balasan yang mematikan, apabila

negara lain yang dipersepsikan sebagai musuh tidak melakukan serangan awal. Negara yang melakukan aktivitas mengancam diharuskan memiliki kekuatan militer yang kuat. Sehingga musuh berfikir dengan memperhitungkan konsekuensi yang didapatkan apabila benar-benar akan melakukan serangan.

Dalam buku “*Deterrence Now*” terdapat enam elemen yang menjadi dasar bagi negara dalam melakukan pencegahan:

1. Adanya konflik. Dalam konteks sistem dunia yang anarki, negara melakukan berbagai cara untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dalam konteks ini, negara menunjukkan sifat egois yang hanya berfokus pada pencapaian tujuan nasionalnya sendiri. Sifat egois tersebut yang kemudian berdampak pada munculnya ancaman yang berkembang menjadi konflik dengan negara lain.
2. Rasionalitas. Negara memikirkan efek untung rugi yang didapatkan pasca melakukan serangan pertama. Negara akan memikirkan kembali sebelum melakukan serangan. meskipun serangan yang dilakukan berpotensi memberikan keuntungan.
3. Ketakutan terhadap ancaman serangan balasan. Ketika negara melakukan serangan untuk pertama kalinya maka, negara tersebut berpikir mengenai efek serangan balasan yang akan didapatkan. Serangan balasan tentu akan jauh lebih besar efek merugikan jika dibandingkan dengan serangan awal yang dilakukan.
4. Kerusakan yang tidak dapat diterima. Ketika negara memutuskan untuk berperang maka, efek terburuk yakni kerusakan yang luar biasa menjadi yang paling diperhitungkan.
5. Gagasan mengenai kredibilitas. Negara berupaya menunjukkan kekuatan yang dimiliki melalui kapabilitas militer. Tujuannya adalah menjadi bahan pertimbangan musuh sebelum memutuskan untuk melakukan serangan.
6. Kondisi tidak stabil. Manakala perang terjadi maka, tentu akan menimbulkan kondisi tidak stabil di kawasan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya skala ancaman di sektor kawasan (Morgan, 2003:14)

Asumsi dasar dari pencegahan berdasar pada pemikiran kaum realis yang memiliki kaitan erat dengan posisi negara sebagai aktor utama yang anarki. Negara cenderung melakukan berbagai macam daya dan upaya dalam pencapaian kepentingan nasional. Negara tidak peduli dengan efek yang ditimbulkan bagi aktor-aktor lain dalam proses upaya pencapaian kepentingan nasionalnya. Sikap egois tersebut yang kemudian berkembang menjadi ancaman pemicu terjadi konflik. Berdasarkan pada kondisi tersebut, negara dituntut untuk menggunakan sisi rasionalitasnya. Tujuannya adalah untuk menekan ancaman dan konflik yang terjadi tidak semakin parah. Cara rasional yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kekuatan militer (Hara, 2011:36).

Branislav L. Slantchev menjelaskan bahwa teori pencegahan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meyakinkan musuh agar tidak melakukan tindakan serangan. Penjelasan mengenai konsekuensi yang didapatkan menjadi bagian yang paling ditekankan. Teori pencegahan hanya berfokus pada upaya dalam melindungi *status quo*. Negara cenderung untuk mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan memikirkan efek samping dari tindakannya (Slantchev, 2005:6).

Menurut Stephen L Quakenbush (Quakenbush, 2011:6) Teori Pencegahan memiliki signifikansi dalam proses menyusun strategi. Strategi ditujukan untuk mengetahui tindakan yang paling rasional untuk mengancam agar pihak lain tidak melakukan serangan. Strategi yang dibentuk juga mampu memproyeksikan tindakan jangka pendek aktor untuk mencegah pecahnya perang.

Dalam menganalisa strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur, Teori pencegahan sesuai untuk menjelaskan upaya Tiongkok dalam menghadapi ancaman keamanan di sektor maritim. Ancaman keamanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur berdasar pada dibentuknya kebijakan luar negeri Amerika Serikat yakni *Pivot Asia*. Implementasi kebijakan tersebut salah satunya adalah aktivitas latihan militer bersama untuk mempererat hubungan kedua negara.

1.5.2. Teori Perimbangan Kekuatan (*Balance of Power Theory*)

Perimbangan kekuatan didefinisikan oleh Morgenthau sebagai bentuk upaya negara dalam mempertahankan atau menggulingkan *status quo* (Morgenthau

dalam Toke, 2005). Hal tersebut berkaitan dengan hakekat utama dari perimbangan kekuatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hegemoni oleh aktor tunggal. Dalam perspektif realis, sistem internasional yang anarki menjadi penyebab negara menjadi agresif hanya dengan mengejar akumulasi kekuatan. Sikap agresif negara dapat memicu terjadinya dilema keamanan yang menimbulkan dampak buruk bagi pencapaian kepentingan nasional.

Dalam Teori perimbangan kekuatan, kekuatan militer menjadi unsur yang paling rasional yang dilakukan negara untuk menghadapi ancaman akibat peningkatan kekuatan negara lain (Danilovic, 2002:74). Sikap negara yang saling meningkatkan kekuatan dalam teori perimbangan kekuatan, merupakan cara untuk menciptakan stabilitas dalam sistem. Apabila sistem internasional stabil, maka tercipta kondisi yang disebut dengan damai dalam kondisi struktural. Tetapi, perimbangan kekuatan juga dapat dimaksudkan guna mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perang di masa depan (Odgaard, 2007:28).

Bagi Randall L. Schweller (Schweller, 2016:6), perimbangan kekuatan diartikan sebagai penciptaan atau agresi kekuatan militer melalui mobilisasi internal yakni, melakukan aliansi untuk mencegah dan menghalangi dominasi oleh kekuatan asing. Negara melakukan penyeimbangan kekuatan dengan menitikberatkan pada upaya mencegah hilangnya wilayah kedaulatan atau kepentingan vital. Keputusan dalam melakukan perimbangan kekuatan tidak hanya berdasarkan pada upaya menciptakan stabilitas, namun juga dapat dimaknai sebagai persiapan untuk kemungkinan terjadinya perang.

Terjadinya persaingan negara dalam melakukan peningkatan kekuatan negara, tidak dapat dipungkiri bahwa perang mungkin terjadi. Negara dapat mencegah terjadinya perang dengan meyakinkan pihak lain terkait dengan konsekuensi yang akan didapatkan. Sebagai bentuk kewaspadaan, negara dapat melakukan upaya peningkatan kekuatan militer sebesar-besarnya. Tindakan tersebut bukan merupakan bagian untuk dapat menghegemoni, melainkan bagian dari strategi paling tepat dalam menjamin negara untuk dapat bertahan hidup (Odgaard, 2007:27).

Untuk dapat menciptakan keseimbangan, negara juga membutuhkan hubungan aliansi dengan negara sekitar. Tujuan dari membentuk aliansi yakni sebagai bentuk pengawasan terhadap ancaman potensial. Tetapi, membangun hubungan aliansi bukan merupakan hal yang utama. Hal tersebut terkait dengan hubungan aliansi yang memberikan dampak menguntungkan dan merugikan bagi negara (Goswami, 2013). Salah satu dampak positif dari hubungan aliansi adalah distribusi kekuasaan untuk membentuk sistem-sistem internasional agar tidak terjadi dominasi oleh satu kekuatan tunggal.

Mengacu pada hakekat perimbangan kekuatan, strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur memiliki tiga asumsi dasar utama. Asumsi bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat dalam posisi bermusuhan. Perimbangan kekuatan terjadi manakala terdapat dua aktor atau lebih dalam posisi bermusuhan. Tiongkok mempersepsikan Amerika Serikat adalah musuh berdasarkan pada:

- a. Eskalasi kekuatan militer Amerika Serikat di Asia pasca dibentuknya kebijakan *Pivot Asia*. Kebijakan *pivot Asia* bagi Tiongkok merupakan upaya untuk membatasi ruang gerak khususnya di sektor maritim (Swaine, 2013). Sejak kemenangan Partai Komunis Tiongkok (PKC) dalam pemilihan umum pada tahun 1949, Amerika Serikat mempersepsikan Tiongkok sebagai musuh. Hal tersebut berkaitan erat dengan posisi ideologi Amerika Serikat yang liberal yang menentang ideologi sosialis komunis.
- b. Pecahnya Perang Korea di tahun 1950-1953. Dalam perang tersebut, Korea Selatan dibantu oleh militer Amerika Serikat sedangkan Korea Utara dibantu oleh Tiongkok yang merupakan sesama negara komunis. Meski kini Perang Korea telah berakhir namun genjatan senjata masih tetap berlangsung. Amerika Serikat membangun pangkalan militer untuk memberikan dukungan kekuatan kepada Korea Selatan. Pangkalan militer Amerika Serikat menjadi simbol kuat kekuatan militer Amerika Serikat untuk menghadapi Korea Utara yang mendapatkan dukungan kekuatan militer dari Tiongkok.
- c. Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Militer Amerika Serikat memberikan dukungan penuh bagi Taiwan dengan menjalin kerjasama jual beli senjata. Hal tersebut merupakan ancaman kuat bagi pencapaian

kepentingan nasional Tiongkok. Tiongkok melakukan upaya untuk mengembalikan Taiwan menjadi bagian dari wilayah kedaulatannya. Kepentingan Tiongkok terhadap Taiwan disebut oleh Tiongkok dengan kebijakan “*One China Policy*” (Chapman, 2017).

Strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur merupakan perwujudan dari teori perimbangan kekuatan. Tiongkok membentuk strategi pertahanan khusus di laut Cina Timur melakukan peningkatan aktivitas militer angkatan laut Tiongkok atau PLAN, modernisasi kapabilitas militer, melaksanakan latihan militer bersama angkatan laut Rusia dan menetapkan strategi anti akses dan penolakan wilayah (Anti A2/AD), untuk mengimbangi militer Amerika Serikat dan negara aliansinya di Asia Timur.

1.6 Argumen Utama.

Strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur adalah dengan meningkatkan aktivitas militer Angkatan Laut Tiongkok atau *People Liberation Army* (PLAN) bersama dengan Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok (*China Coast Guard*, CCG), latihan militer Tiongkok dengan angkatan laut Rusia dan menetapkan strategi anti akses dan penolakan wilayah di laut Cina Timur. Strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina ditujukan untuk mencegah serangan militer Amerika Serikat dan negara aliansinya di laut Cina Timur.

1.7 Metode Penelitian.

Metode penelitian dibutuhkan dalam penulisan karya tulis ilmiah untuk membantu penulis dalam menganalisa dan menjawab permasalahan. Dalam proses penelitian perlu ditetapkan langkah-langkah yang sistematis untuk menentukan jenis data yang diperlukan, sumber data, serta bagaimana data-data tersebut harus dihimpun lalu diolah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan Bogdan dan Taylor sebagai sebuah prosedur penelitian berupa kata-kata maupun perkataan seseorang yang ditulis secara deskriptif berdasarkan pada perilaku tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada upaya mengkaji serta menguraikan sebuah fenomena dengan tujuan memahami fenomena secara lebih dalam. Penelitian kualitatif dalam prosesnya, mengolah data – data yang bersifat sekunder yang bersumber dari data hasil wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen sebagai media pendukung dalam menguraikan sebuah fenomena.

1.7.2 Sifat Penelitian

Berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dijelaskan sebagai bentuk penguraian fenomena yang dikaji melalui sumber utama data yakni berupa dokumen, majalah, artikel, foto, hasil wawancara serta situs – situs resmi yang diakses guna mendukung penelitian. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode deskriptif dalam menguraikan serta menjelaskan strategi pertahanan maritim Tiongkok di Laut Cina Timur.

1.7.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini berfokus pada aktivitas Tiongkok sebagai aktor utama, yang membentuk strategi pertahanan maritim di laut Cina Timur.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi dasar dari suatu penelitian. Ditinjau dari sumber data, penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media atau dokumen tertulis yang masih relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data sekunder tersebut didapatkan penulis melalui metode studi pustaka pada beberapa tempat adalah :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
2. Ruang Baca dan Perpustakaan FISIP Universitas Jember

Sedangkan untuk sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah berupa:

1. Buku

2. Jurnal dan Artikel

1.7.5 Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan suatu obyek penelitian. Pemilihan metode ini dilakukan karena memungkinkan penulis untuk menginterpretasikan berbagai data sekunder yang telah diperoleh. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisa hingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sedangkan metode kualitatif digunakan karena obyek penelitian adalah suatu manusia dan fenomena sosial yang sifatnya dinamis dan tidak dapat diinterpretasikan melalui pengukuran statistik.

1.8 Sistematika penulisan

Argumen–argumen dalam skripsi ini akan penulis uraikan dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab 1 penulis akan menyajikan poin-poin penting yang menjelaskan alasan-alasan dasar penulis dalam mengangkat tema atau judul dalam skripsi ini sehingga menjadi menarik untuk diteliti serta dikaji. Poin-Poin yang dijelaskan dalam bab ini meliputi latar belakang, lingkup pembahasan (meliputi batasan materi dan batasan waktu), rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama metode penelitian.

BAB 2 Ancaman terhadap Tiongkok di Laut Cina Timur

Bab ini akan menjelaskan mengenai ancaman-ancaman yang dihadapi Tiongkok di laut Cina Timur. Dalam bab ini juga akan dijelaskan pula mengenai dinamika yang terjadi di laut Cina Timur.

BAB 3 Respon Tiongkok terhadap Ancaman di Laut Cina Timur

Bab ini akan membahas mengenai respon Tiongkok menghadapi ancaman di laut dengan strategi pertahanan Tiongkok. Bab ini juga akan membahas kepentingan militer Amerika Serikat di Asia Timur.

BAB 4 Strategi Pertahanan Maritim Tiongkok di Laut Cina Timur

Bab ini akan menjelaskan strategi-strategi pertahanan maritim yang dilakukan oleh Tiongkok di laut Cina Timur. Pembahasan bab ini akan disesuaikan dengan teori yang telah ditetapkan di bab 1

BAB 5 Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan dari uraian yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya sekaligus sebagai penutup dari kesimpulan pembahasan.



BAB 2. ANCAMAN TERHADAP TIONGKOK DI LAUT CINA TIMUR

Laut Cina Timur menjadi salah satu wilayah perairan di Asia Timur yang penting bagi perekonomian negara di kawasan tersebut. Beberapa potensi yang dimiliki laut Cina Timur seperti sumber daya dan wilayah strategis mampu menjadi daya tarik kuat bagi negara untuk berperan aktif di wilayah perairan. Negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dan Taiwan merupakan negara yang memiliki peranan penting dalam perekonomian global. Sehingga negara-negara di kawasan Asia Timur tersebut kemudian melakukan peningkatan aktivitas di sektor maritim. Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan dominasi di wilayah maritim khusus di laut Cina Timur.

Selain negara di kawasan Asia Timur, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang ikut meningkatkan aktivitas di laut Cina Timur. Kehadiran Amerika Serikat diklaim sebagai bentuk upaya menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Namun disisi lain, Amerika Serikat memiliki ketertarikan terhadap sumber daya alam laut Cina Timur untuk perekonomian negaranya. Untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas kawasan, Amerika Serikat membentuk kebijakan "*Pivot Asia*". Kebijakan tersebut secara umum ditujukan untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara aliansinya di kawasan Asia khususnya Asia Timur. Implementasi dari kebijakan pivot Asia yakni dilakukan latihan militer bersama Amerika Serikat dan negara aliansinya di laut. Salah satu wilayah maritim yang menjadi fokus latihan militer adalah laut Cina Timur.

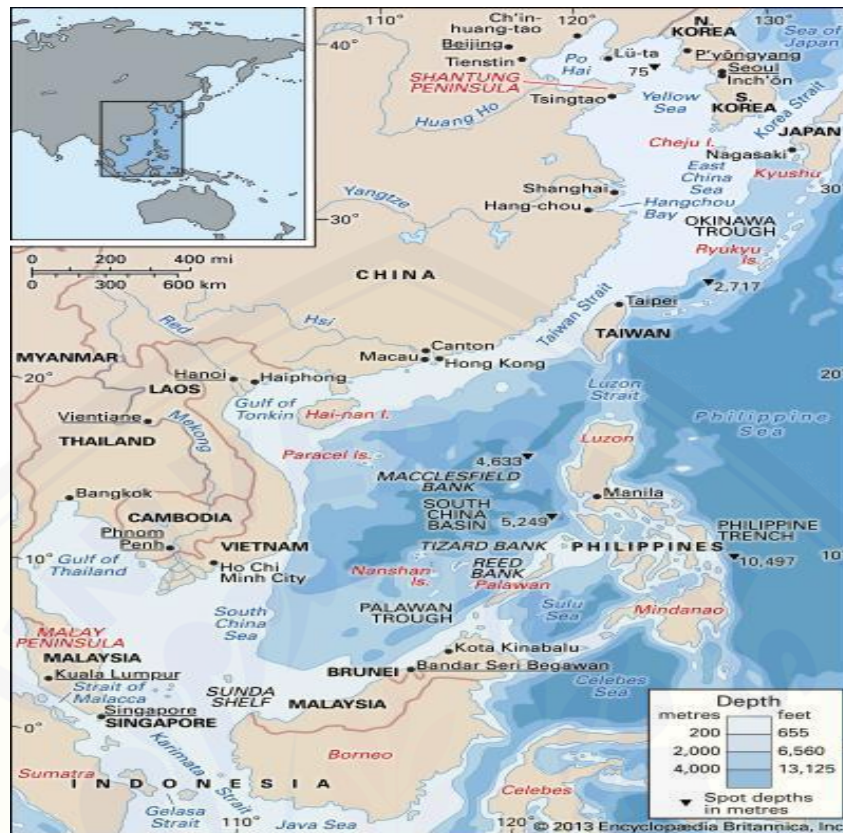
Peningkatan aktivitas di laut Cina Timur oleh Amerika Serikat dan negara aliansinya melalui kebijakan "*Pivot Asia*", menimbulkan ancaman tersendiri bagi Tiongkok. Peralnya, peningkatan aktivitas pencapaian kepentingan nasional di laut Cina Timur, mengancam hak dan kepentingan Tiongkok di laut Cina Timur. Selain itu, aktivitas militer Amerika Serikat dan aliansi di laut Cina Timur, memunculkan konstelasi politik.

2.1. Profil Laut Cina Timur

Laut Cina Timur merupakan laut marginal terletak di bagian timur laut Samudra Pasifik dengan titik koordinat $117,2^{\circ}$ – $131,0^{\circ}$ lintang timur dan 23.0

° - 33.2 ° lintang utara. Laut Cina Timur memiliki luas area sekitar 773.700 km² dengan panjang 1.300 km dan lebar 740 km. Laut Cina Timur merupakan laut yang membentang ke timur menuju Kepulauan Ryukyu, dipisahkan dari Laut Kuning ke utara dengan garis dari ujung utara sungai Changjiang dan mengalir hingga ke Pulau Jeju Korea Selatan. Laut Cina Timur terhubung ke Laut Jepang dari Selat Tsushima dari arah timur laut. Kemudian di barat daya, Laut Cina Timur, dipisahkan dari Laut Cina Selatan oleh garis antara Pulau Nanao dan Pulau Eluanbi di ujung selatan Selat Taiwan (Zhang, 2015:10).

Laut Cina Timur merupakan muara aliran empat sungai besar di Tiongkok yakni sungai Qiantang, sungai Oujiang, sungai Minjiang dan sungai Yangtze. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi proses pencampuran air laut dan air tawar. Sehingga laut Cina Timur mengalami salinitas atau kadar garam yang rendah (Emmers, 2010:40). Laut Cina Timur yang memiliki kadar garam rendah, menyebabkan wilayah perairan tersebut kaya akan keanekaragaman hayati. Selain itu, dengan kadar garam rendah, laut Cina Timur cocok digunakan untuk pembibitan ikan. Sebagian besar ikan di laut Cina Timur merupakan spesies yang penting secara ekonomi (Liu, 2013).



Gambar 2.1 Peta Laut Cina Timur

Diakses dari <https://www.britannica.com/place/East-China-Sea> diakses pada 2

Januari 2019.

Laut Cina Timur diperkirakan memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Menurut laporan *Energy Information Administration* (EIA) terdapat sumber daya alam berupa minyak dan gas alam yang terkandung di laut Cina Timur. Diperkirakan cadangan minyak bumi diperkirakan mencapai 60 – 100 juta barel, sedangkan cadangan gas alam yang terkandung diduga mencapai 1 hingga 2 triliun kubik (Bendini, 2014:24). Sumber daya alam minyak dan gas bumi diperkirakan berada di sekitar pulau Senkaku/Diaoyu.

Pentingnya minyak bumi dan gas alam bagi negara, tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai bahan bakar. Untuk mewujudkan kepentingan nasional di sektor ekonomi, negara membutuhkan banyak sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam, untuk menggerakkan roda industri. Jumlah minyak bumi dan gas alam yang terus berkurang, membuat negara melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sumber daya alam tersebut. laporan *Energy Information*

Administration (EIA) mengenai cadangan sumber daya alam di laut Cina Timur, berdampak signifikan pada meningkatnya aktivitas negara-negara Asia Timur di wilayah maritim tersebut.

Laut Cina Timur juga memberikan keuntungan lain untuk kepentingan perekonomian negara khususnya negara di Asia Timur. Laut Cina Timur merupakan salah satu jalur komunikasi laut (*Sea Line of Communication*, SLOC) perdagangan global. Jalur komunikasi laut atau *Sea Line of Communication* (SLOC) merupakan rute perdagangan di laut yang digunakan untuk menghubungkan satu negara dengan negara lain. Jalur komunikasi laut digunakan untuk aktivitas ekspor barang hasil produksi, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara (Khalid, 2012). Asia Pasifik memiliki dua rute perdagangan utama untuk distribusi barang produksi. Pertama adalah rute dari laut Cina Timur dan laut Jepang menghubungkan kapal barang menuju ke wilayah Amerika Serikat dan Kanada melalui Samudra Pasifik. Kedua adalah jalur dari laut Cina Selatan untuk menuju ke Samudra Hindia atau ke kawasan Timur Tengah (Guoxing, 2000).

Di era globalisasi, negara di kawasan Asia Timur menempatkan maritim sebagai sektor penting bagi pencapaian kepentingan nasional. Laut Cina Timur yang menjadi bagian dari jalur komunikasi laut, memberikan keuntungan besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara di Asia Timur. Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi global, memprioritaskan proses distribusi barang hasil produksi berjalan dengan cepat dan aman. Rute perdagangan di laut Timur memberikan keuntungan besar berkaitan dengan efisiensi dan ekonomis (Jiang, Li, & Gong, 2018).

2.2. Kebijakan *Pivot Asia* Amerika Serikat

Asia Pasifik menjadi kawasan penting bagi pencapaian kepentingan nasional Amerika Serikat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan potensi dan daya tarik yang dimiliki oleh kawasan Asia Pasifik. Asia Pasifik merupakan kawasan yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian global (Worldbank, 2012). Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia khususnya Asia Timur

yang cepat, dapat dimanfaatkan oleh Washington untuk mencapai tujuan nasionalnya di sektor ekonomi. Selain itu, sumber daya alam yang melimpah juga menjadi daya tarik Amerika Serikat untuk meningkatkan peranannya di kawasan Asia Pasifik. Oleh sebab itu, pada tahun 2012, Amerika Serikat mengumumkan kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik yang disebut dengan *Pivot Asia* (Schiavenza, 2013).

Pivot Asia merupakan kebijakan strategis yang dibentuk oleh Amerika Serikat untuk meningkatkan peranan dalam mewujudkan kepentingan nasional. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyebutkan bahwa *Pivot Asia* merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk menjamin keamanan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik (Etzioni, 2014). *Pivot Asia* atau kebijakan perimbangan kembali secara khusus difokuskan untuk mewujudkan kepentingan nasional Amerika Serikat di bidang ekonomi, politik dan keamanan. *Pivot Asia* adalah bagian dari strategi geopolitik Amerika Serikat.

Pivot Asia memiliki lima tujuan utama (Manyin, Daggett, Dolven, & Martin, 2012) :

1. Pertama adalah memperkuat aliansi bilateral Amerika Serikat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan latihan militer bersama Jepang dan Amerika Serikat di laut Cina Timur.
2. Memperdalam hubungan kerjasama di kawasan. Hal tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di Asia Timur.
3. Melakukan perluasan dan penguatan perdagangan dan investasi. Amerika Serikat membentuk Strategi Ekonomi Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership, TPP).
4. Merperan aktif untuk menjalin hubungan multilateral regional. Amerika Serikat ikut berpartisipasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur.
5. Meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat. Tujuan diwujudkan dengan memindahkan angkatan laut dan angkatan udara dari Timur Tengah dan Eropa ke Asia Pasifik.

Pivot Asia atau kebijakan perimbangan kembali dimaknai sebagai upaya Amerika Serikat mempertahankan hegemoni. Hal tersebut memiliki kaitan erat dengan cara yang dilakukan Amerika Serikat, melalui peningkatan kehadiran militernya di Asia Timur. Angkatan laut dan udara Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah dan Eropa, dipindahkan untuk menetap di kawasan Asia. Keputusan tersebut di klaim untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan (Mills, 2015).

Disisi lain, kebijakan *Pivot Asia* Amerika Serikat memiliki agenda tersendiri. *Pivot Asia* sengaja dibentuk untuk mempersiapkan diri menghadapi kebangkitan Tiongkok (Cordesmann & Kendall, 2016). Perkembangan ekonomi yang diimbangi dengan peningkatan kekuatan militer Tiongkok, mampu menjadikan negara tersebut sebagai kekuatan global baru. kemudian, Tiongkok memiliki persoalan dengan negara aliansi Amerika Serikat di Asia Timur. faktor tersebut menjadi alasan kuat bagi Amerika Serikat mempersepsikan Tiongkok sebagai ancaman. Apabila kebangkitan Tiongkok terus berkembang, maka Tiongkok sewaktu-waktu dapat menggeser dominasi Amerika Serikat (Southgate, 2017).

Untuk mempertahankan dominasi kekuatannya, Amerika Serikat memfokuskan kekuatan militernya di kawasan Asia Timur. salah satu upaya Amerika Serikat adalah melaksanakan latihan militer bersama dengan Jepang. Latihan militer tersebut difokuskan di wilayah maritim tepatnya di laut Cina Timur (BBC, 2012). Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Jepang untuk menghadapi Tiongkok di laut Cina Timur.

Kebijakan *Pivot Asia* sejatinya merupakan upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan kepemimpinan globalnya. Kebangkitan Tiongkok di bidang ekonomi dan militer menjadi alasan pengembangan kebijakan tersebut. Amerika Serikat merasa terancam dengan kekuatan Tiongkok yang dapat menghalangi pencapaian kepentingan nasional dan eksistensi Amerika Serikat.

Kebijakan *Pivot Asia* justru dianggap oleh Tiongkok sebagai ancaman kuat terhadap keamanan negaranya. Berdasarkan pada tujuan utama kebijakan penyeimbangan kembali, Amerika Serikat melakukan latihan bersama dengan Jepang di laut Cina Timur. Tiongkok merupakan negara yang berkonflik dengan

Jepang di wilayah perairan laut Cina Timur. Keterlibatan militer Amerika Serikat justru menyebabkan konflik laut Cina Timur menjadi semakin rumit. Keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik laut Cina Timur, semakin membahayakan keamanan kedaulatan maritim dan posisi Tiongkok (Sheila a Smith, 2013).

2.3. Dinamika Konstelasi Politik di Kawasan Asia Timur

Dinamika konstelasi politik di kawasan Asia Timur, tidak dapat dilepaskan dari upaya pencapaian kepentingan nasional. Konflik laut Cina Timur menjadi salah satu penyebab munculnya dinamika di kawasan Asia Timur. Jepang dan Tiongkok merupakan aktor utama dalam konflik sengketa kedaulatan maritim di laut Cina Timur. Masing-masing negara memiliki persepsi tersendiri untuk menguatkan posisinya di laut Cina Timur. Konflik di laut Cina Timur memasuki babak baru dengan keterlibatan militer Amerika Serikat. Keterlibatan militer Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan dari komitmen dalam menjamin stabilitas kawasan Asia dan keamanan negara aliansinya. Komitmen tersebut merupakan bagian dari kebijakan *Pivot Asia* yang secara khusus ditujukan untuk melindungi negara aliansinya di kawasan Asia dan mempertahankan eksistensinya di kawasan.

Konflik Tiongkok dan Korea Selatan, menjadi salah satu faktor penyebab dinamika di kawasan Asia Timur. Korea Selatan menuduh Tiongkok sebagai penyebab tenggelamnya kapal Cheonan. Tuduhan tersebut memiliki alasan kuat terkait dengan peningkatan aktivitas militer Tiongkok di laut. Konflik Tiongkok dengan Taiwan juga mempengaruhi dinamika konstelasi kawasan Asia Timur. Keinginan Tiongkok untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Tiongkok mempersepsikan Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan. Keinginan Tiongkok menjadikan Taiwan sebagai wilayah kedaulatan tersebut, disebutkan dalam buku putih pertahanan sebagai "*China One Policy*" (MOD People's Republic of China, 2015).

2.3.1. Tiongkok dengan Jepang

Konflik kedaulatan maritim di laut Cina Timur masih menjadi isu utama yang mempengaruhi hubungan Tiongkok dengan Jepang. Konflik laut Cina Timur

berawal pada 17 Juni 1971, Ketika Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian pulau milik Jepang. dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa semua wilayah yang dikuasai oleh militer Amerika Serikat, dikembalikan kembali ke Jepang. pada perjanjian tersebut, disebutkan bahwa salah satu pulau milik Jepang adalah Diaoyu. Hal tersebut memunculkan respon Tiongkok yang menolak kepulauan Diaoyu menjadi bagian dari wilayah Jepang (Embassy of People's Republic of China, 2012).

di tahun 2012, perdana menteri Jepang Yoshihiko Noda membeli tiga dari lima pulau di laut Cina Timur. Keputusan Jepang tersebut, dipersepsikan oleh Tiongkok sebagai ancaman kedaulatan di laut Cina Timur (Sheila a Smith, 2013). Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkuat status hukum dalam kepemilikan kepulauan yang tentu berkaitan dengan kedaulatan wilayah di laut Cina Timur.

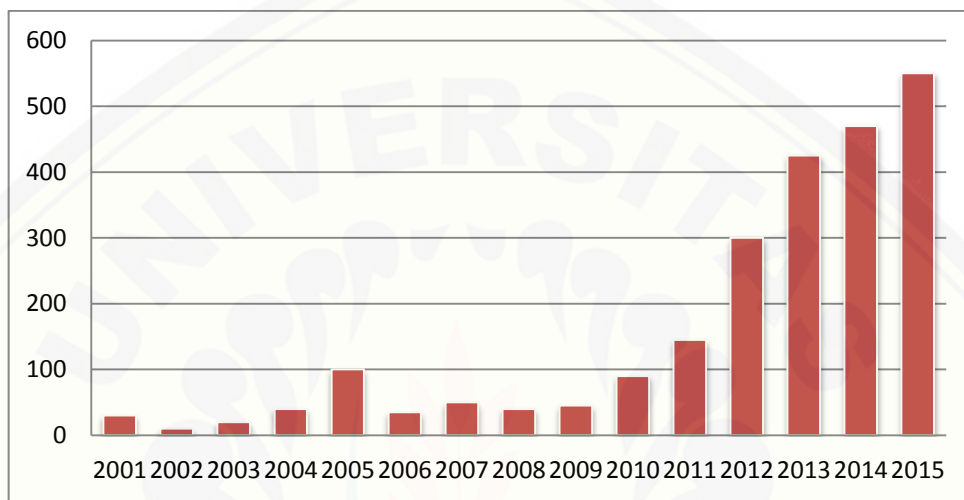
Protes diplomatik dan demonstrasi masal anti Jepang, dilakukan Tiongkok untuk merespon aktivitas militer di laut Cina Timur (Smith, 2013:3). Namun cara tersebut, tidak memberikan pengaruh terhadap aktivitas Jepang. Peningkatan aktivitas militer Jepang yang mengubah pola Tiongkok dalam penyelesaian masalah kedaulatan maritim. Sehingga Tiongkok menggunakan cara yang sama dan seimbang untuk menjaga hak dan kepentingan kedaulatan di laut Cina Timur.

Peningkatan aktivitas militer Jepang bagi Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari peranan Amerika Serikat. Komitmen Amerika Serikat yang memberikan bantuan pertahanan menjadikan salah satu alasan kuat perilaku militer Jepang. Jepang dan Amerika Serikat memiliki ikatan kerjasama pertahanan.

Sejak dibentuknya kebijakan *Pivot Asia*, hubungan aliansi Amerika Serikat dengan Jepang menjadi lebih kuat. Hal tersebut dibuktikan dengan latihan militer bersama angkatan bersenjata Jepang dengan Amerika Serikat di laut Cina Timur. Pada latihan militer yang dilaksanakan di laut Cina Timur, Amerika Serikat menggunakan kapal induk Carl Vinson dan kapal USS Ronald Reagan. Dua kapal induk tersebut, merupakan bentuk dukungan untuk memberikan jaminan keamanan maritim Jepang (Japan Forward, 2017).

Tiongkok kemudian memutuskan untuk melakukan patroli rutin di sekitar laut Cina Timur. Keputusan Tiongkok tersebut kemudian direspon oleh Jepang

sebagai peningkatan kekuatan dan ancaman perang di kawasan. Jepang mengklaim bahwa aktivitas militer Tiongkok yang meningkat sangat berbahaya. Jepang menyoroti adanya skala peningkatan aktivitas militer Tiongkok di laut Cina Timur dalam setiap tahun. Peningkatan skala ancaman dibuktikan dalam laporan pertahanan yang menunjukkan skala aktivitas patroli pesawat PLAAF di laut Cina Timur.



Gambar 2.2 Grafik Aktivitas Pesawat Tempur Tiongkok di Laut Cina Timur

Sumber : Japan Defense Ministry of Defense. Diakses pada http://www.mod.go.jp/e/d_act/ryouku/ 11 Oktober 2018.

Peningkatan aktivitas militer di laut Cina Timur kedua negara semakin meningkatkan ancaman keamanan Tiongkok di laut Cina Timur. Pesawat tempur Jepang dan Tiongkok terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Tiongkok, pesawat tempur SU-30 Beijing seringkali bertemu dengan pesawat tempur F-15 Jepang yang dianggap sedang melakukan tindakan provokatif di laut Cina Timur (BBC, 2016). Beijing memberikan peringatan untuk tidak melakukan tindakan provokatif kepada Jepang. Tiongkok membutuhkan adanya upaya tegas guna meningkatkan keamanan wilayah kedaulatan maritimnya di laut Cina Timur.

2.3.2. Tiongkok dengan Korea Selatan

Tiongkok terlibat konflik dengan Korea Selatan sehubungan dengan adanya tragedi tenggelamnya kapal angkatan laut Korea Selatan di laut kuning. Kapal Cheonan yang berlayar di sekitar pulau Baengnyeong dengan membawa kurang lebih 104 armada anggota mengalami serangan. Serangan tersebut mengakibatkan sebagian besar awak kapal terluka dan sisanya meninggal dunia. Pemerintah Korea Selatan menyoroiti serangan mendadak yang menenggelamkan kapal angkatan laut dengan menuduh adanya aktor yang secara sengaja melakukan tindakan tersebut. Secara tidak resmi pemerintah menuduh Tiongkok ataupun Korea Utara yang melakukan serangan tersebut.

Tuduhan Korea Selatan kepada Tiongkok maupun Korea Utara memiliki alasan yang cukup kuat. Tuduhan serangan dilakukan oleh Tiongkok terkait dengan peningkatan aktivitas militernya di laut. Tiongkok mengumumkan adanya ambis besar yang ingin dicapai yakni keinginannya menjadi negara kekuatan maritim. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, Tiongkok meningkatkan skala kekuatannya melalui patroli dan pengembangan kapabilitas militer. Peningkatan aktivitas militer tersebut yang dicurigai oleh Korea Selatan menjadi penyebab tenggelamnya kapal Cheonan. Tuduhan Korea Selatan kepada Tiongkok tidak memiliki bukti kuat. Tiongkok dalam latihan militer hanya berfokus pada jaminan keamanan wilayah kedaulatan bukan ditujukan guna melakukan serangan seperti yang dituduhkan Korea Selatan.

Namun muncul spekulasi lain bahwa faktor tenggelamnya kapal angkatan laut Korea Selatan diduga merupakan serangan torpedo yang dilakukan oleh kapalselam Korea Utara. Spekulasi tersebut muncul seiring dengan peningkatan aktivitas militer Korea Utara. Peningkatan aktivitas militer dapat ditelusuri dari adanya latihan tembak angkatan laut Pyongyang di sekitar wilayah perbatasan maritim Seoul. Pihak Korea Selatan menyimpulkan bahwa torpedo yang digunakan untuk menyerang kapal Cheonan diduga adalah torpedo milik Korea Utara (CNN, 2010).

Laporan hasil investigasi Seoul terkait dengan penyebab tenggelamnya kapal angkatan laut tersebut mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat. Melalui

pernyataan Sekertaris pers Gedung Putih yakni Robert Gibbs yang menyatakan bahwa Korea Utara sebagai aktor bersalah sehingga Pyongyang harus bertanggung jawab atas perilakunya tersebut. Tuduhan Amerika Serikat dan Korea Selatan kepada Pyongyang ditepis oleh pemerintah negara tersebut. Menurut Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa senjata yang menghancurkan kapal Cheonan adalah senjata yang berasal dari negaranya (CNN, 2010). Namun Korea Selatan dan Amerika Serikat bersikukuh dengan hasil laporan mereka.

Ketakutan akan serangan lain membuat Korea Selatan dan Amerika Serikat bersepakat untuk meningkatkan hubungan kedua negara tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penjualan sejumlah senjata milik Amerika Serikat kepada Korea Selatan. Beberapa peluru dan rudal jelajah anti kapal menjadi kapabilitas yang disiapkan oleh Amerika Serikat untuk Seoul. Rudal jelajah anti kapal ditempatkan disekitar wilayah perairan yang dekat dengan Korea Utara dan Tiongkok. Hal tersebut kemudian mengundang reaksi Beijing yang menganggap tindakan Korea Selatan terlalu agresif yang dapat menimbulkan ketidakstabilan di wilayah maritim.

Tuduhan Korea Selatan dan Amerika Serikat terkait dengan tenggelamnya kapal Cheonan kepada musuh menunjukkan bukti baru. Kapal Cheonan merupakan kapal dengan fasilitas radar senjata yang mampu menganalisis dengan cepat kapal selam, torpedo, dan pesawat terbang milik musuh yang berpotensi akan menyerang. Apabila torpedo tersebut milik Korea Utara maupun milik Tiongkok, kapal Cheonan dengan cepat akan menerima sinyal dan mempersiapkan strategi serangan balik.

Kemudian muncul adanya fakta bahwa setelah tenggelamnya kapal Cheonan, di dekat lokasi kejadian ditemukan adanya bangkai kapal selam yang diyakini milik Amerika Serikat. Fakta tersebut diungkap dalam siaran kantor berita media elektronik KBS milik Korea Selatan. Dalam siaran yang dilakukan oleh kantor berita KBS, terlihat sebuah helikopter mendekat di bangkai kapal selam sedang mengangkut jenazah yang diyakini sebagai tentara Amerika Serikat

(Globalresearch, 2010). Fakta tersebut nyatanya berupaya untuk disembunyikan oleh pihak Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Korea Utara dan Tiongkok yang kemudian merespon fakta tersebut dengan menunjukkan Seoul dan Washington secara sengaja menyembunyikan fakta dan menunjuk dua negara tersebut sebagai tersangka. Hal tersebut kemudian menimbulkan gelombang konflik khususnya bagi Tiongkok kepada Korea Selatan di maritim (Cyranoski, 2010).

2.3.3. Tiongkok dengan Taiwan

Munculnya konflik Tiongkok dengan Taiwan memiliki kaitan erat dengan upaya reunifikasi kedua negara tersebut yang hingga saat ini masih belum menemukan jalan tengahnya. Tiongkok menginginkan Taiwan menjadi bagian dari negaranya dengan memberikan keistimewaan berupa administrasi yang khusus. Namun implementasi kebijakan reunifikasi menjadi faktor pemicu konflik berkepanjangan yang melibatkan kekuatan militer dalam penyelesaian.

Ketegangan Tiongkok dengan Taiwan berawal dari kemenangan Partai Komunis sebagai partai mayoritas dan menjadikan Mao Zedong sebagai kepala negaranya. sebelum kemerdekaan terdapat dua kekuatan besar di Tiongkok yakni kekuatan Partai Komunis Tiongkok dibawah kekuasaan Mao Zedong serta Koumintang dibawah kepemimpinan Chiang Kai Shek. Kemenangan Partai Komunis menjadi pukulan bagi Chiang Kai Shek dan pengikutnya. Sehingga kelompok tersebut melakukan pelarian hingga ke pulau terluar dari Tiongkok.

Chiang Kai Shek bersama dengan pengikutnya membangun pemerintahan baru di sebuah kepulauan dengan sistem berbeda yang disesuaikan dengan mandat Koumintang. Pemerintahan baru tersebut di bawah kepemimpinan Chiang Kai Shek yang kemudian dikenal dengan Taiwan. Chiang Kai Shek kemudian melakukan sejumlah kebijakan bagi Taiwan. Salah satunya adalah kebijakan terkait dengan kepemilikan kekuatan militer. Kepemimpinan Koumintang di wilayah terluar Tiongkok diklaim oleh Mao Zedong merupakan bagian dari negaranya dan berusaha akan merebut kekuasaan di wilayah tersebut.

Di tahun 1970, Taiwan yang berada dibawah kepemimpinan Chiang Ching-kuo dan Tiongkok berad di bawah kepemimpinan Deng Xioping memikirkan

gagasan untuk mengesampingkan konflik dengan melakukan upaya persatuan. Deng Xiaoping mengusulkan gagasan yang disebut dengan “Satu negara Dua Sistem” kepada Taiwan. Gagasan tersebut sejatinya memberikan keistimewaan kepada Taiwan untuk dapat memiliki pemerintahan sendiri dan pasukan sendiri tetapi tetap menjadi bagian dari Tiongkok.

Upaya perdamaian terus berlangsung hingga di tahun 1990 kedua negara bersepakat untuk berbicara mengenai upaya penyelesaian konflik dengan cara damai. Upaya tersebut dibuktikan dengan dibentuknya *Strait Exchange Foundation* (SEF). Pada 1991 sekretaris jenderal SEF Chen Changwen melakukan perjalanan ke Taipei untuk melakukan perundingan upaya penyatuan kembali wilayah tersebut ke dalam bagian dari Tiongkok.

Di tahun 1992 muncul gagasan yang disebut dengan “Konsensus 1992” yang didalamnya terdapat pernyataan resmi terkait dengan arti “satu Tiongkok”. Kedua belah pihak secara intensif bertemu untuk membahas mengenai upaya reunifikasi. Namun terpilihnya kepala negara Taiwan yang baru yakni memberikan pengaruh besar bagi keberhasilan upaya reunifikasi. Ma Ying-Jeou menyebutkan bahwa satu negara dengan dua sistem sangat tidak relevan bagi Taiwan. hal tersebut sangat merugikan bagi Taiwan (*The Greater China Journal*, 2016).

Respon Taiwan tersebut kemudian memancing amarah Tiongkok. Hu Jintao merespon pernyataan Ma Ying-Jeou dengan menyebutkan bahwa Taiwan masih mengakui konsensus 1992, maka upaya reunifikasi akantetap terus diupayakan. Pemerintah Tiongkok tidak segan untuk menggunakan kekuatan militer untuk mengembalikan Taiwan menjadi bagian dari wilayah kedaulatannya. Pernyataan Tiongkok tersebut yang kemudian ditafsirkan oleh Taiwan sebagai ancaman intervensi militer terhadap negaranya.

Upaya reunifikasi dengan Taiwan masih terus diupayakan oleh Tiongkok. Reunifikasi dengan Taiwan menjadi bagian penting yang disebutkan dalam kertas putih pertahanan Tiongkok. Meski Taiwan menentang kebijakan tersebut dan berupaya untuk melakukan peningkatan kekuatan, Tiongkok tetap menganggap bahwa Taipei menjadi bagian dari negaranya yang harus diperjuangkan.

Konflik Tiongkok dengan Taiwan mengalami peningkatan pasca Taipei menjalin hubungan tidak resmi dengan Amerika Serikat. Dalam hubungan tersebut keduanya memiliki kesepakatan untuk membangun kerjasama dengan melaksanakan proses jual beli senjata. Taiwan membeli sejumlah kapabilitas milik Amerika Serikat yakni pesawat tempur untuk meningkatkan keamanan negara.

Kerjasama tidak resmi Taiwan dengan Amerika Serikat semakin membuat Tiongkok geram. Pasalnya pihak yang diajak bekerjasama oleh Taiwan dipersepsikan oleh Tiongkok sebagai musuhnya. Kerjasama tersebut kemudian memacu Tiongkok untuk menggunakan metode intervensi militer untuk menjadikan Taiwan sebagai bagian dari negaranya. Namun Taiwan juga bersikukuh tidak ingin menjadi bagian dari Tiongkok. Taipei selalu mengklaim bagian dari negara berdaulat dan sah.

BAB 3. RESPON TIONGKOK TERHADAP ANCAMAN DI LAUT CINA TIMUR

Tiongkok menjadikan maritim sebagai fokus baru dalam mewujudkan kepentingan nasional. Hal tersebut, tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem internasional yang menempatkan maritim sebagai jalur perdagangan global. Kemudian, pentingnya maritim bagi Tiongkok memiliki kaitan erat dengan menjamin hak dan kepentingan. Konflik laut Cina Timur dengan Jepang merupakan ancaman bagi keamanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur. Kemudian eksistensi militer implikasi dari kebijakan *Pivot Asia*, juga memberikan pengaruh besar terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Untuk menjamin keamanan dan mewujudkan kepentingan di sektor maritim, Tiongkok merespon ancaman melalui strategi pertahanan.

3.1. Strategi Pertahanan Maritim Tiongkok

Definisi strategi secara umum adalah pemikiran berdasarkan pada informasi yang dituangkan ke dalam kebijakan maupun peraturan. Tujuan dari strategi untuk menentukan kepentingan dan cara untuk mewujudkan dengan kemampuan yang dimiliki (Macdonald, 2013). Tiongkok menjadikan maritim sebagai wilayah baru untuk mewujudkan kepentingan nasional. Maritim merupakan unsur penting untuk mewujudkan cita-cita Tiongkok yang disebutkan dengan “Peremajaan Bangsa”. Istilah Peremajaan Bangsa digunakan oleh Tiongkok untuk menggambarkan pembangunan untuk menjadikan negaranya lebih kuat dan besar (Xie, 2014).

Strategi pertahanan maritim Tiongkok merupakan seperangkat pedoman, kebijakan dan peraturan untuk melindungi kedaulatan, hak dan kepentingan di wilayah maritim (Martinson, 2016). Strategi pertahanan yang difokuskan di wilayah maritim didasarkan pada beberapa aspek penting seperti ekonomi, politik dan keamanan. Dari segi ekonomi, maritim merupakan jalur perdagangan global yang penting bagi perekonomian. Dari sudut politik, maritim merupakan wilayah kedaulatan penting untuk menunjukkan eksistensi negara. Kemudian dari segi

keamanan, maritim merupakan wilayah terdepan untuk membangun pertahanan negara (Pham, 2014).

Laut Cina Timur menjadi salah satu fokus wilayah penting untuk keberlangsungan hidup Tiongkok. Laut Cina Timur merupakan wilayah penting bagi pengembangan ekonomi, melestarikan lingkungan laut dan eksploitasi laut. Laut Cina Timur memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam, yang penting bagi perekonomian. Selain itu, laut Cina Timur merupakan bagian dari jalur komunikasi laut (*Sea Lines of Communication*, SLOC). Jalur komunikasi laut di perairan laut Cina Timur digunakan untuk akses langsung ke Samudra Pasifik (Emmers, 2013).

Pentingnya laut Cina Timur sebagai fokus strategi pertahanan memiliki kaitan erat dengan dinamika yang terjadi di kawasan. Tiongkok terlibat konflik dengan Jepang terkait dengan klaim kedaulatan pulau Diaoyu/Senkaku di laut Cina Timur. Tiongkok merupakan negara yang memiliki hak atas pulau Diaoyu berdasar pada Hukum Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan (*Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*) yang disahkan pada tahun 1992. Berdasarkan Hukum Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan disebutkan dalam pasal 2 bahwa :

“The PRC's territorial land includes the mainland and its offshore islands, Taiwan and the various affiliated islands including Diaoyu Island, Penghu Islands, Dongsha Islands, Xisha Islands, Nansha (Spratly) Islands and other islands that belong to the People's Republic of China” (Standing Committee of the National People's Congress, 1992).

Tidak hanya konflik kedaulatan dengan Jepang, pentingnya laut Cina Timur sebagai fokus strategi pertahanan yakni berkaitan dengan kebijakan *Pivot Asia* Amerika Serikat. Kebijakan *Pivot Asia* memiliki tujuan untuk memperkuat aliansi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Menurut Chuck Hegel selaku Sekretaris Negara Bagian Amerika Serikat menyampaikan bahwa, 60 persen angkatan laut dan angkatan udara akan ditempatkan di Asia Pasifik sebelum tahun 2020 (Meijer, 2015). Pernyataan tersebut merupakan upaya Tiongkok untuk mengehegemoni kawasan Asia Pasifik.

Kebijakan *Pivot Asia* berdampak signifikan dengan peningkatan aktivitas militer Jepang. Keputusan Jepang mencabut larangan hak konstitusi untuk bela diri kolektif. hak konstitusi untuk bela diri kolektif merupakan hak Jepang untuk menggunakan militer dengan tujuan berperang. Hak tersebut dicabut oleh militer Amerika Serikat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Keamanan Jepang dan Amerika Serikat (Macdonald, 2013). Kebijakan Jepang mencabut larangan hak konstitusi untuk bela diri kolektif, merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan kepentingan Tiongkok.

Strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur difokuskan untuk meningkatkan kekuatan militer. Menurut Tiongkok kekuatan militer adalah faktor utama menjadi negara kuat. dengan militer yang kuat maka, hak dan kepentingan di wilayah maritim akan mudah untuk diwujudkan (Xiaoyan, 2014). Strategi pertahanan maritim Tiongkok berfokus untuk mewujudkan jaminan keamanan di laut Cina Timur.

3.2. Kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur

Asia khususnya Asia Timur merupakan kawasan yang penting bagi Amerika Serikat. Kekayaan sumber daya dan wilayah yang strategis menjadi daya tarik bagi Amerika Serikat. Namun, eksistensi Amerika Serikat di Asia tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dalam ekonomi. Menempatkan kekuatan dan mempertahankan *status quo* di Asia, menjadi tujuan utama Amerika Serikat. Amerika Serikat khawatir akan kebangkitan kembali komunisme khususnya di kawasan Asia.

Pasca Perang dunia II, terdapat dua ideologi yang mendominasi yakni ideologi liberal kapitalis Amerika Serikat dan ideologi sosialis-komunis Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet berupaya untuk menyebarkan ideologi ke seluruh kawasan tidak terkecuali di kawasan Asia. Persaingan ideologi liberalis Amerika Serikat dan sosialis-komunis Uni Soviet, berdampak pada munculnya konflik. salah satunya adalah Korea yang terbagi menjadi dua negara dengan ideologi berbeda. Korea Selatan berada di bawah kuasa Amerika Serikat dan Korea Utara berada di bawah pengaruh sosialis komunis Uni Soviet. Kekhawatiran Amerika

Serikat mulai muncul, pasca ideologi sosialis komunis mampu menyebar dengan cepat di Asia. Kemerdekaan Tiongkok dengan kemenangan mutlak Partai Komunis Tiongkok di tahun 1949.

Sebagai bentuk pencegahan, Amerika Serikat berupaya meningkatkan kekuatan serta pengaruhnya di Asia Timur. diawali dengan memperkuat hubungan dengan negara aliansi dengan di Asia Timur. Pertama adalah dengan Jepang. Kekalahan Jepang dalam perang dunia II, menjadi jalan bagi Amerika Serikat untuk membangun kekuatan di Asia. Pasca serangan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang mengakui kekalahannya melalui penandatanganan perjanjian San Fransisco. Dalam perjanjian tersebut Jepang berada dibawah kekuasaan sekutu dengan memberikan kuasa terhadap beberapa wilayah salah satunya adalah kepulauan Ryukyu. Kepulauan Ryukyu menjadi pangkalan militer pertama Amerika Serikat di Asia (Price, 2001).

Setelah berhasil menjadikan Jepang sebagai basis kekuatan, selanjutnya adalah strategi pemberian dukungan kepada korea Selatan. Dalam upaya membendung komunisme, Amerika Serikat menjalin hubungan baik dengan Korea Selatan melalui sektor pertahanan. Kekhawatiran ancaman serangan Korea Utara, membuat Korea Selatan tidak dapat menolak tawaran bantuan yang diberikan oleh Washington. Bantuan tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan keamanan yang merujuk pada pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan.

Pecahnya Perang korea di tahun 1950 menjadi awal eksistensi militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Pada Perang Korea, Washington mengambil peranan penting dalam memberikan bantuan kekuatan maupun senjata bagi Korea Selatan. Bantuan kekuatan yang diberikan tidak dapat dilepaskan dari adanya satu kepentingan utama. Washington berupaya untuk menghancurkan Korea Utara yang dikenal dengan negara komunis. Amerika Serikat tidak menghendaki adanya negara komunis yang mampu mengancam eksistensinya di kawasan. Perang Korea di tahun 1950-1953 merupakan bentuk nyata rivalitas antara dua kekuatan dalam upaya menghegemoni kawasan. Korea Selatan dan Amerika Serikat beserta

Jepang dengan liberalismenya sedangkan Korea Utara dan Tiongkok dengan sosialis komunisnya (American History,2018).

Untuk membendung komunisme di Asia tidak hanya Korea Selatan dan Jepang yang menjadi bagian dari negara aliansi Amerika Serikat, Taiwan juga bersedia menjadi sekutu dari negara adidaya tersebut. Konflik antara Tiongkok dengan Taiwan menjadi latar belakang kehadiran kekuatan militer Washington di Taiwan. Kekhawatiran akan serangan militer yang dilakukan oleh Tiongkok, Taiwan meminta bantuan perlindungan dari militer Amerika Serikat. Kebutuhan akan jaminan rasa aman serta stabilitas kawasan membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan yang dapat mencapai kebutuhan tersebut.

Bagi Amerika Serikat, keamanan negara-negara aliansinya yang berada di wilayah Asia lebih mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan kawasan lain seperti Eropa dan Timur tengah. Prioritas tersebut tercermin dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih banyak dipusatkan di Asia. Peningkatan aktivitas Amerika khususnya militernya di sekitar laut Cina Timur menjadi bagian dari upaya jaminan keamanan terhadap negara aliansinya. Meningkatkan eksistensi negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan dalam aspek militer disatu sisi memberikan dampak positif terkait dengan stabilitas kawasan. Namun kebangkitan Tiongkok dalam aspek militer khususnya, membuat tidak hanya Amerika Serikat namun juga negara aliansinya yang berada di Asia Timur menjadi segan. Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang berada di sekitar Laut Cina Timur memiliki sejarah konflik membutuhkan adanya satu kekuatan yang dapat menopang apabila Tiongkok melakukan peningkatan aktivitas militer.

Peningkatan kekuatan militer Tiongkok yang diimbangi dengan peningkatan aktivitas militer di sekitar Laut Cina Timur menjadi tantangan besar bagi eksistensi Amerika Serikat di Asia pasifik. Palsalnya, kebangkitan Tiongkok memiliki dampak besar terhadap eksistensinya di Asia. Hal tersebut dianggap dapat mengganggu pencapaian geopolitik Amerika Serikat di Asia . Dominasi aktivitas Tiongkok di maritim khususnya laut Cina Timur mengganggu pencapaian kepentingan Amerika Serikat serta stabilitas kawasan di laut. Bagi

Amerika Serikat keamanan maritim Asia menjadi bagian penting jalur perdagangan global. Maka Amerika Serikat berupaya untuk meningkatkan eksistensinya di Asia Timur tidak hanya untuk kepentingan stabilitas kawasan namun juga keamanan jalur perdagangan global yang berdampak pada perekonomian negara adidaya tersebut (Pilger, 2016).

3.3. Aliansi Amerika Serikat di Asia Timur

Aliansi merupakan bagian penting bagi pencapaian kepentingan nasional Amerika Serikat. Membangun hubungan aliansi merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi dan hegemoni. Asia Timur menjadi salah satu kawasan penting bagi Amerika Serikat. Aliansi Amerika Serikat di Asia Timur ditujukan untuk menjaga stabilitas regional.

3.3.1. Aliansi Amerika Serikat dengan Jepang

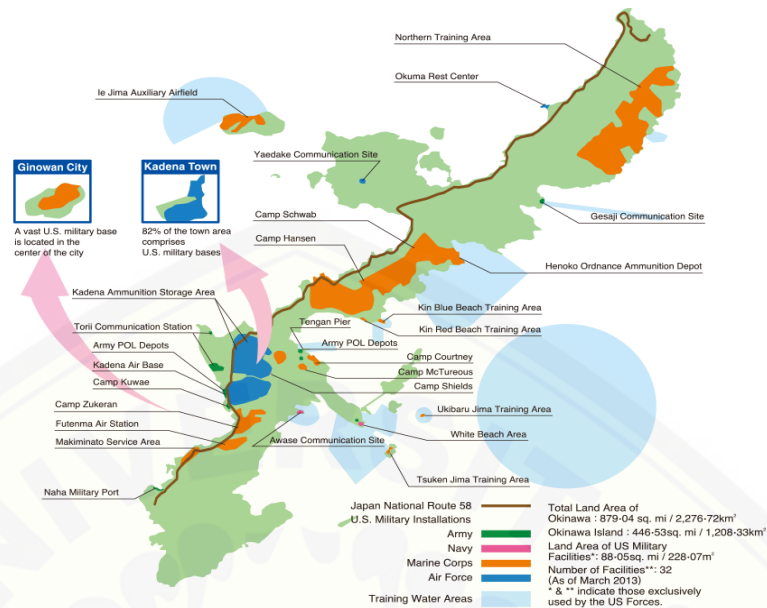
Jepang merupakan negara Jepang tumbuh menjadi sebuah kekuatan baru di Asia Timur. Kekayaan sumber daya alam serta kekuatan perekonomian yang didapatkan dari pengembangan industri serta teknologi terbaru, menjadikan Jepang sebagai negara yang memiliki peranan penting di kawasan Asia. Di satu sisi, letak geografis Jepang memberikan kelebihan yang mampu menjadi daya tarik. Hal tersebut yang kemudian mampu membuat Amerika Serikat untuk semakin meningkatkan pengaruhnya di Jepang.

Hubungan diplomatik yang dijalin antara Amerika Serikat dengan Jepang dimulai sejak tahun 1858. Namun di tahun 1941 hubungan diplomatik kedua negara terputus sejak keputusan Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour yang menjadi cikal bakal pecahnya Perang Dunia II (U.S Department of State, 2017). Kekalahan pada Perang Dunia II, memaksa Jepang untuk menyerahkan diri pada Amerika Serikat. dengan deklarasi penyerahan diri, Amerika Serikat memiliki kontrol penuh terhadap Jepang. Salah satu hal penting yang dilakukan Amerika Serikat yakni menonaktifkan militer Jepang yakni angkatan udara dan angkatan laut. Trauma akan serangan serta kebangkitan militer Jepang, membuat Amerika Serikat memilih jalan membubarkan angkatan bersenjata Jepang (Yoshida, 2013).

Eksistensi militer Amerika Serikat di Jepang ditandai dengan dibentuknya pasukan militer Amerika Serikat untuk Jepang atau USFJ yang beranggotakan angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara. Pada tanggal 19 Januari 1960 Amerika Serikat dan Jepang menandatangani perjanjian kerjasama keamanan. berdasarkan pasal VI dalam perjanjian kerjasama keamanan, angkatan bersenjata Amerika Serikat secara permanen berada di wilayah kedaulatan Jepang sebagai bentuk kontribusi dalam menjamin keamanan serta stabilitas kawasan di Asia Timur. dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa militer Amerika Serikat memiliki hak untuk menggunakan fasilitas milik Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan,2018).

Militer Amerika Serikat yang secara permanen menetap di Jepang, terbagi kedalam beberapa wilayah yakni Okinawa, Kyushu serta Honshu. Okinawa menjadi wilayah yang paling dominan digunakan oleh militer Amerika Serikat. Berdasarkan pada perjanjian kerjasama keamanan, Jepang memberikan tanah serta sumber daya yang berada di Okinawa sebagai fasilitas untuk dikelola militer Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat memberikan jaminan akan keamanan wilayah kedaulatan kepada Jepang sebagai bentuk konsekuensi (Militarybases).

Penempatan pangkalan militer yang permanen di Okinawa tidak lepas dari ketertarikan Washington terhadap wilayah tersebut. Setidaknya terdapat 31 fasilitas militer yang ada di Okinawa serta terdapat satu fasilitas militer yang digunakan bersama oleh militer Amerika Serikat dengan angkatan militer Jepang. Terdapat pangkalan militer udara yakni Kadena serta beberapa *camp* militer di wilayah tersebut. Terdapat lebih dari 50.000 angkatan bersenjata yang terdiri dari penerbang aktif, tentara, pelaut dan marinir (Okinawa Prefectural Government,2018).



Gambar 3.1 : Pangkalan Militer Amerika Serikat di Pulau Okinawa Jepang

Sumber : <http://dc-office.org/basedata> diakses pada 4 April 2018.

Angkatan laut Jepang atau Barisan Bela Diri maritim Jepang (*Japan Maritime Self Defense Force*, JMSDF) menjadi yang paling diunggulkan. Dibuktikan dengan kepemilikan kapal perang Izumo yang dibuat oleh industri militer dalam negeri, menjadikan Jepang sebagai negara yang tidak bisa disepelekan kekuatan militernya. Kapal Perang seri Izumo mampu membawa 14 helikopter sebagai kapabilitas penunjang dalam menciptakan keamanan laut di sekitar wilayah Laut Cina Timur (Naval Technology, 2018).

Meski memiliki angkatan militer yang kuat, Jepang tentu masih sangat bergantung pada militer Amerika Serikat dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan wilayah kedaulatan. Salah satu bentuk ancaman yang dirasakan oleh Jepang adalah upaya serangan Korea Utara. Korea Utara menerbangkan rudal balistik nuklir miliknya yang ditujukan kepada Jepang. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan juru bicara militer Korea utara yang menyatakan bahwa pulau utama Jepang dan Okinawa berada dalam kisaran target rudal nuklirnya (The Telegraph, 2013).

Pada uji coba peluncuran ketiga, Korea Utara berhasil menerbangkan rudal balistik nuklir ke arah Jepang. Rudal balistik tersebut mendarat di wilayah zona

ekonomi eksklusif Jepang. Hal tersebut tentu mengundang respon Perdana Menteri Jepang yakni Shinzo Abe. Abe menyatakan bahwa tindakan Pyongyang tersebut merupakan tindakan kekerasan yang mengancam keamanan yang keji (The New York Times, 2013). Oleh sebab itu, penting bagi Jepang untuk melakukan tindakan untuk menghadapi serangan rudal balistik milik Korea Utara.

Serangan balistik Pyongyang yang ditujukan kepada Jepang mengundang respon militer Amerika Serikat. Amerika Serikat mengecam tindakan peluncuran rudal balistik yang diduga memiliki perangkat pemicu ledakan nuklir. Tindakan provokatif Korea dicurigai memiliki keterkaitan erat dengan Tiongkok. Hal tersebut menjadi relevan terkait dengan posisi Tiongkok yang merupakan sekutu kuat Korea Utara. Washington menduga bahwa perusahaan Tiongkok memberikan dukungan dengan menjual material pendukung bom nuklir Korea Utara (Independent, 2016).

Untuk mencegah serangan militer Korea Utara, Amerika Serikat berkomitmen dalam meningkatkan kekuatannya di Jepang. dalam perjanjian yang dilakukan dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, Amerika Serikat yang diwakili oleh John Kelly dan Chuck Hegel menyampaikan bahwa penting bagi Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan kepada Jepang yang merupakan komponen utama dalam hubungan aliansi (The New York Times, 2013).

Bagi Amerika Serikat, peningkatan eksistensinya di Jepang tidak hanya berhubungan dengan peningkatan ancaman Korea Utara, tetapi Jepang memiliki sejarah konflik yang panjang dengan Tiongkok. Salah satunya adalah terkait dengan perebutan atas kedaulatan di Laut Cina Timur. Militer Amerika Serikat berkomitmen untuk mendukung Jepang dalam menghadapi sengketa wilayah dengan Tiongkok. Disisi lain, Tiongkok merupakan musuh Amerika Serikat terkait dengan persaingan hegemoni kawasan.

Salah satu wujud tindakan yang dilakukan adalah membentuk kebijakan yang disebut dengan "*Pivot Asia*". Kebijakan yang dibentuk di era pemerintahan Barack Obama. *Pivot Asia* menekankan pada upaya militer meningkatkan peranan dalam menjamin keamanan negara aliansinya di Asia serta stabilitas kawasan. dalam kebijakan tersebut diterapkan beberapa strategi pertahanan salah satunya

adalah dengan mengirimkan pasukan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah ke kawasan Asia. Hal tersebut dilakukan karena ancaman keamanan yang dirasakan jauh lebih besar di Asia dan sebagian besar pencapaian kepentingan nasionalnya ditujukan di Asia.

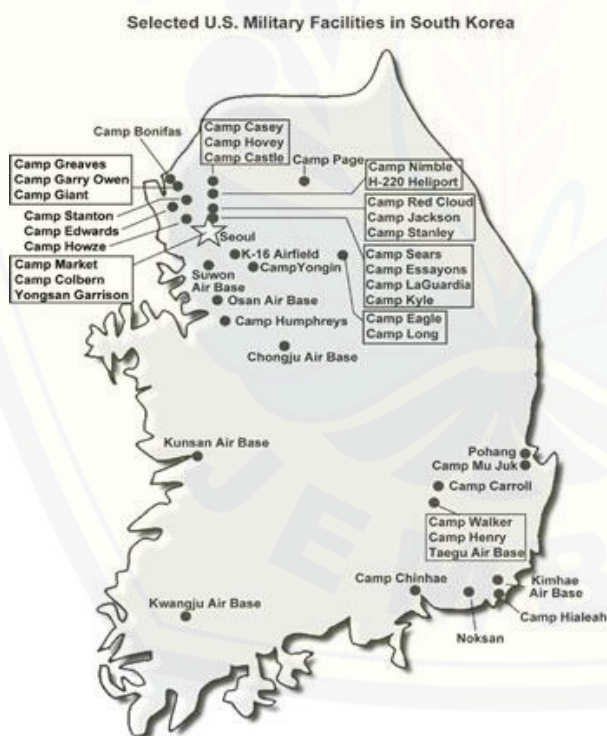
Khusus bagi Jepang, Amerika Serikat menempatkan beberapa kapabilitas militer yakni pesawat tempur F-22 dan pesawat MV-22 *Ospreys* yang ditempatkan di pangkalan militer Okinawa. Selain itu, militer Amerika Serikat berencana merelokasi III *Marine Expeditionary Force*. Selain itu pejabat Jepang berupaya untuk melakukan perundingan dengan militer Amerika Serikat terkait dengan keinginan Tokyo memiliki pesawat tempur F-35 (Japan Ministry of Defense, 2013). Kecanggihan teknologi pesawat tempur F-35 akan digunakan oleh Jepang untuk mendukung keamanan wilayah di sekitar laut Cina Timur.

3.3.2. Eksistensi Amerika Serikat di Korea Selatan

Pecahnya Perang Korea tidak bisa dilepaskan dari adanya persaingan dua negara adidaya pemenang Perang Dunia II, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Korea yang saat itu terpecah menjadi dua dengan paham yang berbeda menjadi awal dari munculnya konflik saudara. Korea Selatan yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat tumbuh menjadi negara demokrasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi yang cepat. Korea Utara yang mendapat pengaruh dari Uni Soviet tumbuh menjadi negara dengan paham komunis hingga saat ini.

Eksistensi Amerika Serikat di Korea Selatan tidak bisa dilepaskan dari upaya membendung komunisme di Asia. Pengaruh komunisme yang semakin kuat di Korea Utara menjadi kekhawatiran besar Washington. Setelah peristiwa jatuhnya Tiongkok ke partai Komunis, Amerika Serikat bertekad untuk menumpas komunisme di Asia. Namun sekali lagi, Amerika Serikat tidak berhasil membendung komunisme pasca kemenangan partai komunis dibawah kepemimpinan Kim Il Sung. Serangan yang dilakukan Korea Utara ke wilayah Korea Selatan dengan melakukan sejumlah uji coba roket nuklir membuat Amerika Serikat perlu untuk ikut berperan membela Korea Selatan (National Archives, 2018).

Hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan terus mengalami penguatan. Pasca perang korea, Amerika Serikat membentuk angkatan bersenjata khusus yang bertugas di Korea Selatan yang disebut dengan *United States Force Korea* (USFK). USFK bersama dengan angkatan bersenjata Korea Selatan berada di bawah gabungan pasukan komando. USFK bertekad untuk membangun keamanan dan perdamaian di sekitar wilayah kedaulatan khususnya di perairan. Untuk semakin mempererat hubungan serta jaminan keamanan wilayah, Amerika Serikat membangun pangkalan militer khusus angkatan laut di Busan (Militarybases, 2018). Busan merupakan kota terbesar kedua setelah Seoul menjadi wilayah yang strategis bagi pangkalan militer angkatan laut Amerika Serikat. Selain itu letak Busan yang dekat dengan Laut Cina Timur menjadi kawasan strategis bagi Amerika Serikat dalam menciptakan stabilitas di Asia (Schogol & Miller, 2016).



Gambar 3.2 Pangkalan Militer Amerika Serikat di Korea Selatan

Sumber : <https://www.businessinsider.com.au/what-you-need-to-know-about-the-us-military-in-korea-2010-3> Diakses pada 8 April 2018.

Untuk semakin mempererat hubungan antar kedua negara, USFK bersama dengan angkatan bersenjata Korea Selatan menyelenggarakan berbagai macam

latihan militer bersama. Salah satu latihan bersama militer yang dilakukan angkatan laut Korea Selatan dengan angkatan laut Amerika Serikat di Korea Selatan yakni “*Foal Eagle*” dan “*Key Resolve*”. Dalam latihan perang tersebut, Amerika Serikat mengerahkan lebih dari 17.000 pasukan serta 300.000 pasukan militer Korea Selatan. Latihan militer yang dilakukan tidak lebih dari bentuk upaya Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menjamin keamanan kedaulatan. disisi lain, aktivitas tersebut sebagai wujud respon terhadap peningkatan kekuatan Korea Utara (CNN, 2016).

Latihan Militer yang dilakukan sebagian besar berada di wilayah perairan. dalam latihan tersebut beberapa alat utama sistem senjata digunakan sebagai pendukung. Kapal tempur *USS John C. Stannis* atau CVN 74, kapal *USS North Carolina* atau BB-55 serta beberapa pesawat seperti pesawat tempur *F-22 Raptors* dan pesawat bomber *B-52* (Schogol & Miller, 2016). Peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat di Korea Selatan tidak hanya sebagai penguatan keamanan kedaulatan Korea Selatan, namun juga sebagai langkah nyata perlindungan kepentingan di Asia. Percepatan pertumbuhan ekonomi serta militer Tiongkok menjadi kekhawatiran terbesar Amerika Serikat. Militer Beijing yang terus meningkat dapat dibuktikan dengan peningkatan alat utama sistem senjata seperti pesawat tempur, artileri yang sebagian besar serta jumlah anggaran belanja militernya. Di lain sisi, uji coba bom nuklir yang terus dilakukan Korea Utara juga menghawatirkan kepentingan Amerika Serikat. Maka Washinton menempuh langkah cepat dengan melakukan penguatan hubungan dengan negara aliansi di Asia Timur salah satunya melalui peningkatan eksistensinya di Korea Selatan.

3.3.3. Eksistensi Amerika Serikat di Taiwan

Kehadiran Amerika Serikat di Taiwan tidak bisa dilepaskan dari ketertarikan Washington atas negara tersebut. Letaknya yang strategis bagi pencapaian keamanan Asia Pasifik, membuat Amerika Serikat memiliki hasrat untuk membangun hubungan baik dengan Taiwan. Dibalik ketertarikan akan wilayah strategis, kehadiran militer Amerika Serikat di Taiwan tidak dapat dilepaskan dari upayanya dalam menekan perkembangan komunis di kawasan Asia Timur.

Eksistensi Amerika Serikat berawal dari pemberian dukungan bagi Taiwan untuk memisahkan diri dari Tiongkok. Kemudian di tahun 1955, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Dwight Eisenhower menyetujui sebuah resolusi yang disebut dengan *Formosa Resolution*. Dalam resolusi tersebut militer Amerika Serikat akan menjamin keamanan Taiwan dengan meningkatkan pertahanan di kawasan Asia Pasifik. Wujud dari kebijakan tersebut yakni dengan mengirimkan pasukan armada ke-7 militer Amerika Serikat. Sejak saat itu, Amerika Serikat memutuskan untuk menempatkan angkatan militernya di Taiwan sebagai bentuk dukungan dalam menghadapi ancaman militer Tiongkok (Glass, 2010).

Dalam upaya meningkatkan keamanan wilayah, angkatan militer Amerika Serikat memberikan bantuan dengan membentuk kerjasama keamanan hasil dari kelanjutan resolusi formosa tahun 1955. Amerika Serikat menyatakan bahwa Taiwan secara tegas berada dibawah perlindungan militernya. Amerika Serikat memberikan banyak bantuan kepada militer Taiwan. salah satunya adalah bantuan keamanan dalam menghadapi musuh potensialnya.

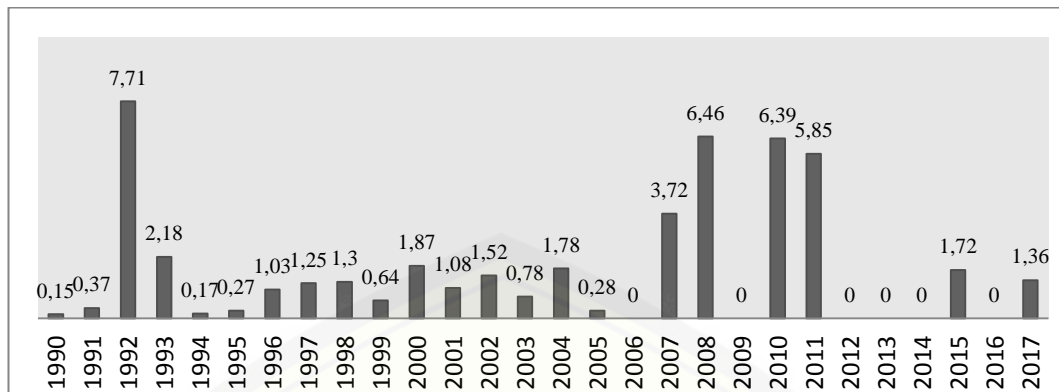
Di tahun 1979 Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Jimmy Carter memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Keputusan tersebut diambil oleh Amerika Serikat sebagai cara yang ditempuh Washington agar dapat membangun kantor kedutaan besar di Beijing. Pada masa tersebut, Washington terikat dalam perjanjian dengan Beijing dimana Amerika Serikat diharuskan untuk tidak mengakui kedaulatan Taiwan. Namun Washington tetap memiliki hubungan baik dengan Taiwan terkait dengan kelancaran pencapaian kepentingan nasionalnya.

Kebijakan Tiongkok yang ditujukan guna melakukan reunifikasi yakni menjadikan Taiwan sebagai bagian dari negaranya, menjadi ancaman terbesar bagi Taiwan. Pasalnya dalam kebijakan “Satu Tiongkok” apabila Taiwan menolak dalam penerapan kebijakan tersebut, Tiongkok tidak segan untuk menggunakan kekuatan militernya. Kecanggihan teknologi serta jumlah kapabilitas yang dimiliki Tiongkok menimbulkan gelombang ancaman besar bagi keamanan wilayahnya.

Untuk dapat menghadapi ancaman Tiongkok, Taiwan sangat bergantung pada militer Amerika Serikat. Amerika Serikat yang secara tidak resmi memiliki ikatan hubungan kerjasama dengan Taipei berupaya untuk mengambil berbagai tindakan pengamanan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan latihan militer bersama di perairan. Latihan militer bersama atau yang dapat disebut dengan *Han Kuang* mengerahkan puluhan alat utama sistem senjata seperti Kapal induk, Kapal perusak, helikopter serta pesawat tempur. dalam latihan militer tersebut Amerika Serikat mempersenjatai angkatan bersenjata Taiwan dengan kapabilitas berteknologi tinggi sebagai solusi pencegahan serangan PLA (Dickey, 2015)

Kerjasama Taiwan dengan Amerika Serikat terus berlanjut dan mengalami peningkatan tajam di tahun 1990. Pada tahun 1990 Amerika Serikat membentuk kebijakan dalam menyuplai asupan senjata Taiwan. Kerjasama dalam jual beli senjata merupakan langkah kongkrit yang dilakukan kedua negara dalam mempererat hubungan. Menurut Rupert Hammond-Chambers selaku Presiden Dewan Bisnis Amerika Serikat-Taiwan menyampaikan bahwa Penting bagi Amerika Serikat memberikan dukungan keamanan bagi Taiwan. Hal tersebut terkait dengan posisi taiwan yang merupakan aspek utama keamanan nasional Washington di Asia. Selain itu, terkait dengan peningkatan ketegangan yang terjadi di sekitar yang dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan (Taiwan Defense & National security, 2017).

Kerjasama dalam penjualan senjata terus menguat dengan perpanjangan kontrak Taiwan dengan Amerika Serikat. Washington menyetujui untuk melakukan penjualan senjata ke luar negeri yakni Taiwan dengan jumlah 1,363 miliar dollar. Beberapa senjata tersebut diantaranya yakni dua kapal rudal *Wayne Hazard Perry*, Kendaraan amfibi, dan sistem anti kapal dan anti rudal pesawat (CNN, 2015).



Gambar 3.3 Grafik Penjualan Senjata Amerika Serikat-Taiwan tahun 1990-2017

Sumber : Taiwan Defense & National Security. *Taiwan Arms Sales Notified to Congress 1990-2017*. <https://www.ustaiwandefense.com/tags/arms-sales/> diakses pada 17 Oktober 2018.

Angkatan Laut Taiwan memainkan peranan penting dalam strategi pertahanan dalam menghadapi serangan potensial dari Tiongkok. Meski secara jelas militer Taiwan mendapatkan bantuan Amerika Serikat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa angkatan bersenjata Taiwan sendiri memiliki basis kekuatan yang cukup besar. Personil aktif angkatan bersenjata Taiwan mencapai 290.000 dari 23 Juta penduduk Taiwan. Selain itu koordinasi yang baik antara kekuatan angkatan laut dengan angkatan udara guna mendukung keamanan dan bantuan serangan di sekitar selat Taiwan. Angkatan laut Taiwan memiliki 28 kapal tempur yang dipersenjatai dengan peluncur rudal. Selain kapal tempur, angkatan laut Taiwan juga memiliki delapan kapal perusak Chi Yang yang digunakan untuk patroli di perairan (Globalresearch, 2016).

Selain kerjasama pertahanan yang dibangun Amerika Serikat dengan Taiwan, adanya upaya lebih dalam mempererat hubungan kedua negara tersebut dengan membentuk *American Institute in Taiwan (AIT)*. AIT merupakan institusi *non profit* yang dibentuk guna menerapkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Taiwan (American Institute in Taiwan). AIT dapat dikatakan sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah Amerika Serikat dalam menyelesaikan maupun pencapaian kepentingannya di Asia khususnya di Taiwan. Dibentuknya

AIT menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat untuk semakin meningkatkan eksistensinya di Taiwan.

Keberadaan militer Amerika Serikat di Jepang, Korea Selatan serta Taiwan, secara tidak langsung semakin meningkatkan eksistensi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Keberadaan kekuatan Amerika Serikat beserta dengan negara aliansinya memunculkan gesekan pengaruh dengan Tiongkok. Beijing yang muncul sebagai aktor dominan di Asia merasakan peningkatan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Keadaan tersebut memunculkan banyak ketegangan khususnya di laut antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dan negara aliansinya. Amerika Serikat yang sejak awal menganggap bahwa Tiongkok merupakan ancaman besar bagi eksistensinya serta pencapaian kepentingannya di Asia membuat negara adidaya tersebut melakukan berbagai macam upaya. Salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan pertahanan untuk stabilitas keamanan kawasan.

BAB 5. KESIMPULAN

Strategi pertahanan maritim Tiongkok didasari oleh adanya ancaman keamanan di Laut Cina Timur. Ancaman keamanan Tiongkok di laut Cina Timur berawal dari Kebijakan Jepang pada tahun 2012 yang membeli tiga dari lima pulau Diaoyu/Senkaku. Ancaman kedua yang muncul adalah kebijakan *Pivot Asia* atau perimbangan kembali Amerika Serikat. Kebijakan *Pivot Asia* Amerika Serikat untuk meningkatkan eksistensi militernya di laut Cina Timur. Kebijakan *Pivot Asia* berdampak signifikan dengan meningkatnya aktivitas militer bersama dengan negara aliansi.

Strategi pertahanan maritim yang dibentuk di laut Cina Timur adalah pertama dengan menetapkan zona identifikasi pertahanan udara di laut Cina Timur. Zona identifikasi pertahanan udara untuk mencegah serangan udara di laut Cina Timur oleh militer Amerika Serikat dan Jepang. Kedua adalah dengan meningkatkan aktivitas militer Tiongkok. Angkatan Laut Tiongkok bersama dengan Pasukan Penjaga Pantai Tiongkok melakukan patroli rutin di laut Cina Timur. Ketiga adalah dengan latihan militer Angkatan Laut Tiongkok dengan angkatan laut Rusia di laut Cina Timur. Latihan militer dengan angkatan laut Rusia merupakan bentuk perimbangan terhadap aktivitas militer Amerika Serikat dan aliansi. Keempat adalah Tiongkok menetapkan strategi anti akses dan penolakan wilayah (*Anti Access and Anti Denial, A2/AD*). Anti Akses dan Penolakan merupakan strategi pertahanan dengan membatasi akses masuk pihak asing kedalam wilayah kedaulatan. Strategi anti akses dan penolakan wilayah menekankan pada pentingnya kapabilitas dengan teknologi canggih seperti rudal balistik dan rudal jelajah.

Tujuan dari strategi pertahanan maritim Tiongkok di laut Cina Timur adalah untuk mencegah terjadi serangan yang berpotensi mengancam keamanan kedaulatan maritim di Laut Cina Timur. Selain itu strategi pertahanan maritim Tiongkok merupakan bentuk perimbangan kekuatan militer Amerika Serikat dan aliansi di Asia Timur di laut Cina Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Cordesman, A. H., & Wang, M. 2015. *Chinese Strategy and Military Modernization in 2015 : A Comparative Analysis*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies.
- Emmers, R. 2013. *Resource Management and Contested Territories in East Asia* (first). Singapore: Palgrave Macmillan.
- Manicom, J. 2014. *Bridging Troubled Waters: China, Japan, and Maritime Order in the East China Sea*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Morgan, P. M. 2003. *Deterrence Now*. New York: Cambridge University Press. Retrieved from www.cambridge.org/9780521822572
- Odgaard, L. 2007. *The Balance of Power in Asia-Pacific Security*. New York: Routledge.. <https://doi.org/10.1017/S0043887109000124>
- Pearson, R. 2014. *East China Sea Tensions*. Washington, D.C.: The Maureen and Mike Mansfield Foundation,.
- Schweller, R. L. 2016. *The Balance of Power in World Politics*. Oxford University Press.
- Singh, P. K. 2016. *Chinese Military Strategy and Doctrine* (first). New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses

Jurnal :

- Bader, J. A. 2016. *How Xi Jinping Sees the World and Why*. Asia Working Group (Vol. 2).
- Chapman, B. 2017. *The east China sea in DOD China military power reports*. Korean Journal of Defense Analysis, 29(1), 71–94. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2006.09.010>
- Duchâtel, M. 2016. *China's Policy in the East China Sea*. China Perspectives Journal (Vol. 69). <https://doi.org/1996-4617>
- Etzioni, A. 2014. *The United States' retreat from the Middle East and pivot to the Far East is likely to intensify*. Defense and Security Analysis, 30(4), 304–310. <https://doi.org/10.1080/14751798.2014.964914>
- Germond, B. 2015. *The geopolitical dimension of maritime security*. Marine Policy, 54, 137–142. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.013>

- Goswami, N. 2013. *Power Shifts in East Asia: Balance of Power vs. Liberal Institutionalism*. *Journal of International Affairs*, 18(1), 3–31.
- Jiang, B., Li, J., & Gong, C. 2018. *Maritime Shipping and Export Trade on "Maritime Silk Road."* *Asian Journal of Shipping and Logistics*, 34(2), 83–90. <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2018.06.005>
- Khalid, N. 2012. *Sea Lines Under Strain: The Way Forward in Managing Sea Lines of Communication*. *The IUP Journal of International Relations*, 6(2), 57–66.
- Liu, J. Y. 2013. *Status of Marine Biodiversity of the China Seas*. *PLS ONE*, 8(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0050719>
- Manyin, M. E., Daggett, S., Dolven, B., & Martin, M. F. 2012. *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's Rebalancing Toward Asia*. Congressional Research Service: 1-25
- The Greater China Journal. 2016. *The 1992 Consensus and China-Taiwan Relations* | The Greater China Journal. Retrieved October 24, 2018, from <https://china-journal.org/2016/08/31/the-1992-consensus-and-china-taiwan-relations/>
- Xie, Z. 2014. *China's Rising Maritime Strategy: Implications for its Territorial Disputes*. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 3(2), 111–124. <https://doi.org/10.1080/24761028.2014.11869077>
- Zhang, J. 2015. *Ecological Continuum from the Changjiang (Yangtze River) Watersheds to the East China Sea Continental Margin*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-16339-0>

Paper:

- Bendini, R. 2014. *The struggle for control of the East China Sea* (PE 536.398 No. QA-04-15-015-EN-N). Brussels. <https://doi.org/10.2861/512997> (paper)
- Danilovic, V. 2002. *Balance of Power and Power Shifts: Global Interests at Stake*. In *Deterrence and Conflict among Major powers* (pp. 71–97). Retrieved from <https://www.press.umich.edu/pdf/0472112872-ch4.pdf>
- Dian, M. 2013. *Japan and the Us Pivot To the Asia Pacific Japan and the Us Pivot To the Asia Pacific*, (January). <https://doi.org/10.1002/jctb.5136>
- Macdonald, A. P. 2013. *China's Maritime Strategy : A Prolonged Period of Formulation* in *Canadian Naval Review*, 8(4), 9–13.
- Martinson, R. D. 2016. *Panning For Gold: Assessing Chinese Maritime Strategy from Primary Sources*. *Naval War College Review*, 69(3), 23–44. Retrieved from <http://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review>

- Mills, C. C. 2015. *The United States' Asia-Pacific Policy and the Rise of the Dragon*. Indo Pacific Strategic Paper Retrieved from <http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/IndoPac/R23177605-1.pdf>
- O'Shea, P. 2015. *The East China Sea maritime and territorial dispute: a stand-off that suits everybody?* *Global Affairs*, 1(4–5), 455–463. <https://doi.org/10.1080/23340460.2015.1110356>
- Valencia, M. J. 2007. *The East China sea dispute: Context, claims, issues, and possible solutions*. *Asian Perspective*, 31(1), 127–167. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.47-6600>

Internet :

- Airforce-technology. 2015. Harbin Y-12 Twin Engine Turboprop Utility Aircraft - Airforce Technology. Retrieved May 23, 2018, from <https://www.airforce-technology.com/projects/harbin12twinengine/>
- Airliners. 2015. Harbin Y-11/12. Retrieved May 23, 2018, from <http://www.airliners.net/aircraft-data/harbin-y-1112/241>
- American History. 2018. The Cold War in Asia and the Middle East & Postwar America & History 1994 & American History From Revolution To Reconstruction and beyond. Retrieved October 9, 2018, from <http://www.let.rug.nl/usa/outlines/history-1994/postwar-america/the-cold-war-in-asia-and-the-middle-east.php>
- American Institute in Taiwan. 2018. U.S.- Taiwan Relations | American Institute in Taiwan. Retrieved April 4, 2018, from <https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/us-taiwan-relations/>
- Armyrecognition. 2016. DF-26 intermediate-range ballistic missile technical data sheet specifications pictures video 11202167 | China Chinese army missile systems vehicles. Retrieved May 22, 2018, from http://www.armyrecognition.com/china_chinese_army_missile_systems_vehicles/df-26_intermediate-range_ballistic_missile_technical_data_sheet_specifications_pictures_video_11202167.html
- Axe.David. 2015. The H-6K Is China's B-52 – War Is Boring – Medium. Retrieved May 23, 2018, from <https://medium.com/war-is-boring/the-h-6k-is-china-s-b-52-64e1ce9b45eb>
- BBC. 2012. US and Japan begin military drills amid China tension - BBC News. Retrieved January 29, 2019, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-20202357>

- BBC. 2013. US and Japan begin military drills amid China tension - BBC News. Retrieved January 31, 2019, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-20202357>
- BBC. 2016. China criticises Japanese jet scramble over East China Sea - BBC News. Retrieved October 23, 2018, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-36710808>
- Brazil, M., Dickey, L., Kania, E., Allen, K., & Chen, J. 2016. In a Fortnight : Chinese Military Aviation in the East China Sea ChinaBrief, 16(16). Retrieved from https://jamestown.org/wp-content/uploads/2016/10/CB_16_16.pdf?x87069
- Carlson, C. P. 2015. Essay: Inside the Design of China's Yuan-class Submarine - USNI News. Retrieved May 22, 2018, from <https://news.usni.org/2015/08/31/essay-inside-the-design-of-chinas-yuan-class-submarine>
- China-Embassy. (2013). CHINA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE — Embassy of the People's Republic of China in the United States of America. Retrieved November 4, 2018, from <http://www.china-embassy.org/eng/zt/dhfksbq2/>
- China Power. (2016). How does China's first aircraft carrier stack up? | China Power Project. Retrieved November 18, 2018, from <https://chinapower.csis.org/aircraft-carrier/>
- Chinadaily. (2013). China's setup of air zone legitimate, conducive to regional peace | Politics | chinadaily.com.cn. Retrieved November 6, 2018, from http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-11/24/content_17127692.htm
- ChinaDaily. (2014). China, Russia naval drill focuses on maritime threat[1]- Chinadaily.com.cn. Retrieved January 24, 2019, from http://www.chinadaily.com.cn/photo/2014-05/19/content_17516148.htm
- ChinaPower. (2016). What does China really spend on its military? | ChinaPower Project. Retrieved May 21, 2018, from <https://chinapower.csis.org/military-spending/>
- Ching, C. (2015). An Embarrassing Fact: The Legal Basis of the PRC East China Sea ADIZ. Retrieved May 18, 2018, from <http://cimsec.org/an-embarrassing-fact-the-legal-basis-of-the-prc-east-china-sea-adiz/19804>
- CNN. (2010). North Korea denies sinking warship; South Korea vows strong response - CNN.com. Retrieved October 24, 2018, from <http://edition.cnn.com/2010/US/05/19/south.korea.ship/index.html>
- CNN. (2010). Report: South Korean navy ship sinks - CNN.com. Retrieved October 23, 2018, from

<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/03/26/south.korea.ship.sinking/index.html>

CNN. (2015). U.S. sells \$1.83B of weapons to Taiwan over Chinese ire - CNNPolitics. Retrieved April 4, 2018, from <https://edition.cnn.com/2015/12/16/politics/u-s-taiwan-arms-sales/index.html>

CNN. (2016). South Korea, U.S. hold “largest ever” military drill - CNN. Retrieved April 4, 2018, from <https://edition.cnn.com/2016/03/12/asia/south-korea-us-military-drill/index.html>

Committee of the National People’s Congress China. (1992). Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone of 25 February 1992, (February), 1–3. http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1992_Law.pdf

Cordesmann, A. H., & Kendall, J. (2016). Evolving Strategies in the U.S.-China Military Balance, 36. Retrieved from https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160808_China_Evolving_Strategy.pdf

Cyranoski, D. (2010). Controversy over South Korea’s sunken ship. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/news.2010.343>

Dickey, L. (2015). Taiwan’s Han Kuang Exercises: Training for a Chinese Invasion One Drill at a Time - Jamestown. Retrieved April 4, 2018, from <https://jamestown.org/program/taiwans-han-kuang-exercises-training-for-a-chinese-invasion-one-drill-at-a-time/>

Embassy of People’s Republic of China. (2012). Full Text: Diaoyu Dao, an Inherent Territory of China. Retrieved January 30, 2019, from <http://my.china-embassy.org/eng/zt/107Topics/t983625.htm>

Glass, A. (2010). House backs Formosa Resolution, Jan. 25, 1955 - POLITICO. Retrieved April 4, 2018, from <https://www.politico.com/story/2010/01/house-backs-formosa-resolution-jan-25-1955-031927>

Globalresearch. (2010). Who Sank the South Korean Warship Cheonan? Destabilization of the Korean Peninsula - Global Research Global Research - Centre for Research on Globalization. Retrieved October 23, 2018, from <https://www.globalresearch.ca/who-sank-the-south-korean-warship-cheonan-destabilization-of-the-korean-peninsula/19375>

Goldsmith, S. A. M. (2012). CHINA ’ S ANTI- - ACCESS & AREA- - DENIAL OPERATIONAL CONCEPT AND THE DILEMMAS FOR JAPAN, Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/156621555>

Heath, T. R. (2016). *Developments in China’s Military Force Projection and*

Expeditionary Capabilities. Retrieved from www.rand.org/pubs/testimonies/CT450.html
www.rand.org/pubs/permissions.html.

Hempel, A. (2016). A Guide to Chinese Naval Anti-Access/Area Denial (A2/AD) - WhiteFleet.net. Retrieved May 22, 2018, from <https://whitefleet.net/2016/08/21/a-pocket-guide-to-chinese-naval-anti-accessarea-denial-a2ad/>

ICAO. (1944). Civil Aviation 1944 Convention, (December). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-00068-8>

Independent. (2016). Chinese company “sold North Korea nuclear bomb materials” | The Independent. Retrieved October 10, 2018, from <https://www.independent.co.uk/news/business/news/china-north-korea-nuclear-bomb-company-investigation-a7320266.html>

Japan Forward. (2017). Japan and the U.S. Conduct Joint Operations in the East China Sea | JAPAN Forward. Retrieved October 22, 2018, from <https://japan-forward.com/japan-and-the-u-s-conduct-joint-operations-in-the-east-china-sea/>

Japan Ministry of Defense. (2013). DEFENSE OF JAPAN 2013 | Japan Ministry of Defense. Retrieved October 11, 2018, from http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2013.html

Kardon, I. B. (2015). Maritime Rights and Interests | Asia Maritime Transparency Initiative. Retrieved February 4, 2019, from <https://amti.csis.org/maritime-rights-and-interests/>

LaFond, E. C. (2018). East China Sea | sea, Pacific Ocean | Britannica.com. Retrieved April 2, 2018, from <https://www.britannica.com/place/East-China-Sea#ref36042>

LaGrone, S. (2014). China and Russia Kick Off Joint Naval Drills - USNI News. Retrieved January 31, 2019, from <https://news.usni.org/2014/05/21/china-russia-kick-joint-naval-drills>

Majumdar, D. (2015). Confirmed: Russia Just Sold 24 Lethal Su-35 Fighters to China | The National Interest. Retrieved February 1, 2019, from <https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/confirmed-russia-just-sold-24-lethal-su-35-fighters-china-14397>

Mauricio, T. (2014). The future of US–Japan military exercises | East Asia Forum. Retrieved January 31, 2019, from <http://www.eastasiaforum.org/2014/07/03/the-future-of-us-japan-military-exercises/>

Meijer, H. (2015). US Primacy in World Politics and the Strategic “Pivot” to Asia

– Defence-In-Depth. Retrieved February 23, 2018, from <https://defenceindepth.co/2015/09/23/us-primacy-in-world-politics-and-the-strategic-pivot-to-asia/>

Mie, A. (2013). Abe presses ahead on collective self-defense | The Japan Times. Retrieved November 25, 2018, from https://www.japantimes.co.jp/news/2013/02/07/national/politics-diplomacy/abe-presses-ahead-on-collective-self-defense/#.W_mVYIczbMw

Military-today. (2016). Su-35 Multi-Role Fighter | Military-Today.com. Retrieved May 23, 2018, from http://www.military-today.com/aircraft/su_35.htm

Military-Today. (n.d.). H-6K Long-Range Strategic Bomber | Military-Today.com. Retrieved May 23, 2018, from <http://www.military-today.com/aircraft/h6k.htm>

Military Today. (2018). DF-21D Medium-Range Ballistic Missile | Military-Today.com. Retrieved May 21, 2018, from http://www.military-today.com/missiles/df_21d.htm

Militarybases. (2018). Fleet Activities Chinhae Navy Base in Busan, South Korea. Retrieved April 4, 2018, from <https://militarybases.com/overseas/south-korea/chinhae/>

Militarybases. (2018). Kadena Air Force Base in Okinawa, Japan | MilitaryBases.com. Retrieved April 4, 2018, from <https://militarybases.com/overseas/japan/kadena/>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2018). MOFA: Japan-U.S. Security Treaty. Retrieved April 4, 2018, from <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>

MOD People's Republic of China. (2015). Full Text: China's Military Strategy. Retrieved February 23, 2018, from http://eng.mod.gov.cn/Press/2015-05/26/content_4586805.htm

MOD The People's Republic of China. (2013). II. Building and Development of China's Armed Forces. Retrieved November 3, 2018, from http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2013-04/16/content_4442757.htm

National Archives. (2018). US Enters the Korean Conflict | National Archives. Retrieved April 4, 2018, from <https://www.archives.gov/education/lessons/korean-conflict>

Naval Technology. (2018). Izumo-Class Helicopter Destroyer - Naval Technology. Retrieved April 4, 2018, from <https://www.naval-technology.com/projects/izumo-class-helicopter-destroyer/>

- Navyrecognition. (2018). China's PLAN Modified Type 039B SSK (Type 039C ?) Continues Trials at Sea. Retrieved May 22, 2018, from <http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2015-news/august-2015-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/2996-chinas-plan-modified-type-039b-ssk-type-039c-continues-trials-at-sea.html>
- NTI (2018.). China Submarine Capabilities | NTI. Retrieved May 22, 2018, from <http://www.nti.org/analysis/articles/china-submarine-capabilities/>
- Okinawa Prefectural Government. (n.d.). Base-related Data | OKINAWA PREFECTURAL GOVERNMENT Washington D.C. Office - Official Site. Retrieved April 4, 2018, from <http://dc-office.org/basedata>
- Osawa, J. (2013). China's ADIZ over the East China Sea: A "Great Wall in the Sky"? Retrieved February 25, 2018, from <https://www.brookings.edu/opinions/chinas-adiz-over-the-east-china-sea-a-great-wall-in-the-sky/>
- Pham, T. N. (2014). *THE CHINESE DREAM AND BEIJING ' S GRAND STRATEGY*. Retrieved February 26,2018, from <http://cimsec.org/the-chinese-dream-and-beijings-grand-strategy/35066>
- Pilger, M. (2016). *ADIZ Update: Enforcement in the East China Sea, Prospects for the South China Sea, and Implications for the United States. US-China Economic and Security Review Commission Staff Report*. Retrieved from [https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/ADIZ Update_0.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/ADIZ%20Update_0.pdf)
- Pollack, J. D. (2016). Changes and prospects for the structure of regional stability in East Asia: A U.S. perspective. Retrieved February 23, 2018, from <https://www.brookings.edu/on-the-record/changes-and-prospects-for-the-structure-of-regional-stability-in-east-asia-a-u-s-perspective/>
- Price, J. (2001). JPRI Working Paper No. 78. Retrieved October 9, 2018, from <http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp78.html>
- Reuters. (2014). U.S., Japan to conduct joint military drill for island defense | Reuters. Retrieved January 23, 2019, from https://www.reuters.com/article/us-usa-japan-defence/u-s-japan-to-conduct-joint-military-drill-for-island-defense-idUSKCN0IA1BL20141021?feedType=RSS_1
- Schogol, J., & Miller, K. (2016). 315,000 U.S. and South Korean troops begin massive exercise as North threatens war. Retrieved April 4, 2018, from <https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2016/03/05/315000-u-s-and-south-korean-troops-begin-massive-exercise-as-north-threatens-war/>
- Smith, S. a. (2013). *A Sino-Japanese Clash in the East China Sea. Council on*

Foreign Relations. Retrieved from <http://www.cfr.org/japan/sino-japanese-clash-east-china-sea/p30504>

Sophie, M. J. T. (2014). *China 's Anti-Access / Area-Denial Strategy and Implications for Special Operations Forces Air Mobility* by. Retrieved from <http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA614148>

Southgate, L. (2017). *The Asia Pivot as a Strategy of Foreign Policy : A source of peace or a harbinger of conflict?* retrieved from <https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/12071>

Stolyarov, G. (2015). Russia, China sign contract worth over \$2 billion for Su-35 fighter jets: source. Retrieved February 1, 2019, from <https://www.reuters.com/article/us-russia-china-jets/russia-china-sign-contract-worth-over-2-billion-for-su-35-fighter-jets-source-idUSKCN0T80K220151120>

Swaine, M. D. (2013). Chinese Views and Commentary on the East China Sea Air Defense Identification Zone (ECS ADIZ), 5, 1–57. Retrieved from <http://carnegieendowment.org/files/CLM43MSCarnegie013114.pdf>

Taiwan Defense & National security. (2017). Trump Announces Arms Sales to Taiwan | Taiwan Defense & Security. Retrieved October 17, 2018, from <https://www.ustaiwandefense.com/the-trump-administration-announces-u-s-arms-sales-to-taiwan/>

Takenaka, K. (2013). U.S., Japan to conduct joint military drill for island defense | Reuters. Retrieved January 31, 2019, from https://www.reuters.com/article/us-usa-japan-defence/u-s-japan-to-conduct-joint-military-drill-for-island-defense-idUSKCN0IA1BL20141021?feedType=RSS_1

The Asia Dialogue. (2014). Welcome to Chinese A2/AD: Version 2.0 – Asia Dialogue. Retrieved November 7, 2018, from <http://theasiadialogue.com/2014/02/13/welcome-to-chinese-a2ad-version-2-0/>

The New York Times. (2013). U.S. and Japan Agree to Broaden Military Alliance - The New York Times. Retrieved October 10, 2018, from <https://www.nytimes.com/2013/10/04/world/asia/japan-and-us-agree-to-broaden-military-alliance.html>

The State Council Information Office of China. (2015). *China 's Military Strategy*. Retrieved September 29, 2017 from http://eng.mod.gov.cn/Press/2015-05/26/content_4586805.htm

The Telegraph. (2013). North Korea threatens nuclear attack on US bases in Japan - Telegraph. Retrieved October 9, 2018, from <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9945546/Nort>

h-Korea-threatens-nuclear-attack-on-US-bases-in-Japan.html

U.S Department of State. (2017). Japan. Retrieved April 4, 2018, from <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm>

UAC. (2016). UAC :: Cy-35. Retrieved May 23, 2018, from <http://uacrussia.ru/en/aircraft/lineup/military/su-35/>

VWeitz, R. (2014). Analyzing Peace Mission 2014: China and Russia Exercise with the Central Asian States - Second Line of Defense. Retrieved September 19, 2018, from <https://sldinfo.com/2014/10/analyzing-peace-mission-2014-china-and-russia-exercise-with-the-central-asian-states/>

Weitz, R. (2015). *Parsing Chinese-Russian Military Exercise*. Retrieved October 11, 2018 from https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2015/ssi_weitz_150415

Wilde, R. (2018). Containment: America's Plan to Curtail Communism. Retrieved January 26, 2019, from <https://www.thoughtco.com/what-was-containment-1221496>

Worldbank. (2012). Kawasan Asia Timur dan Pasifik tetap kuat menghadapi situasi global yang menantang: Bank Dunia. Retrieved January 29, 2019, from <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/04/10/east-asia-pacific-growth-remains-resilient-in-face-of-challenging-global-environment-says-world-bank>

Xiaoyan, W. (2014). *China's "Sea Power Nation" Strategy*. Retrieved Desember 22, 2018 from <http://isdpeu/content/uploads/publications/2014-wu-chinas-sea-power-nation-strategy>

Yoshida, R. (2013). Basics of the U.S. military presence | The Japan Times. Retrieved April 4, 2018, from <https://www.japantimes.co.jp/news/2008/03/25/reference/basics-of-the-u-s-military-presence/#.WsPN9dRubMx>

Zhang, F. (2016). Challenge Accepted: China's Response to the US Rebalance to the Asia-Pacific. *Security Challenges*, 12(3), 45–60. Retrieved from https://www.regionalsecurity.org.au/resources/Files/SC12_3Zhang.pdf